

**PENGARUH TINGKAT SOSIALISASI, SIKAP KERJA
APARAT PELAKSANA DAN KEMAMPUAN KERJA APARAT
PELAKSANA TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR : 11
TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN
SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

ARIO DANU

D4E002090

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
KONSENTRASI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

2005

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH TINGKAT SOSIALISASI, SIKAP KERJA APARAT
PELAKSANA DAN KEMAMPUAN KERJA APARAT PELAKSANA
TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG NOMOR : 11 TAHUN 2000 TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG**

NAMA PENULIS : ARIO DANU
NIM : D4 E002090

Tesis telah disetujui
Tanggal :

Pembimbing I,


Drs. Sandarso, SU

Pembimbing II


Drs. Ari Subowo, MA

**PENGARUH TINGKAT SOSIALISASI, SIKAP KERJA APARAT
PELAKSANA DAN KEMAMPUAN KERJA APARAT PELAKSANA
TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG NOMOR : 11 TAHUN 2000 TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

ARIO DANU

D4E002090

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal :

Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji/ Pembimbing I,

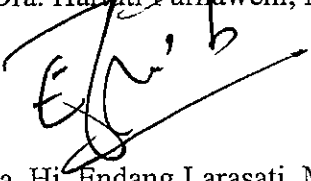

Drs. Sundarso, SU

Anggota Tim Penguji lain :

1. 
Dra. Hartati Purnaweni, MPA

Sekretaris Penguji/ Pembimbing II,


Drs. Ari Subowo, MA

2. 
Dra. Hj. Endang Larasati, MS

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

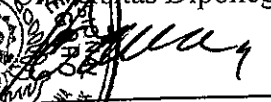
Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal :

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 3944/T/MAPI/G.1
Tgl. : 15/11/05




Ketua Program Studi MAP
Universitas Diponegoro


Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diteliti atau ditebitkan orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Desember 2005


ARIO DANU

RINGKASAN

JUDUL : PENGARUH TINGKAT SOSIALISASI, SIKAP KERJA APARAT PELAKSANA DAN KEMAMPUAN KERJA APARAT PELAKSANA TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR : 11 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

NAMA : ARIO DANU

NIM : D4E002121

Dalam rangka otonomi daerah Pemerintah Kota Semarang berusaha melakukan penggalan Pendapatan Asli Daerah salah satunya melalui retribusi dari Pedagang Kaki Lima yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana dalam peraturan tersebut PKL yang telah membayar retribusi tersebut diberikan pengaturan dan pembinaan PKL.

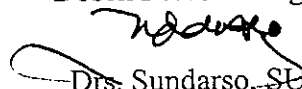
Permasalahan yang muncul berkaitan dengan implementasi peraturan daerah tersebut adalah kurang efektifnya implementasi kebijakan ketika diterapkan dilapangan, terlihat dari secara umum target pencapaian retribusi selama lima tahun kurang berhasil dan masih banyaknya PKL yang penempatannya masih kurang teratur. Beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab kurang efektifnya implementasi kebijakan tersebut adalah tingkat sosialisasi yang kurang efektif, sikap kerja aparat pelaksana kurang mendukung dan kemampuan kerja pelaksana yang kurang memadai.

Dalam rangka menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan teori-teori implementasi dari George Edward III, Rina Martini, dkk dan Van Meter dan Van Horn, hasil analisis menunjukkan bahwa kurang efektifnya implementasi kebijakan tersebut, diduga disebabkan oleh tingkat sosialisasi yang kurang efektif, sikap kerja aparat pelaksana kurang mendukung dan kemampuan kerja aparat pelaksana kurang memadai.

Berdasarkan tujuan penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatory untuk mengetahui pengaruh antara variabel penelitian. Instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan rumus Koefisien Korelasi kendall, Koefisien Kokordansi Kendall dan Koefisien Determinan (KD).

Hasil penelitian menunjukkan, hipotesis minor dan mayor yang diajukan dalam penelitian diterima. Dalam rangka memperbaiki implementasi kebijakan tersebut penulis memberikan beberapa saran yaitu pemberian buku perda tentang pengaturan dan pembinaan PKL kepada aparat pelaksana kebijakan dan PKL, sosialisasi yang intensif, pencantuman prosedur dan persyaratan perijinan PKL dikantor PKL melakukan perijinan, dan pelatihan bagi sikap dan kemampuan kerja aparat pelaksana kebijakan.

Dosen Pembimbing I


Drs. Sundarso, ST

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian adalah dalam rangka mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat sosialisasi, sikap kerja aparat pelaksana dan kemampuan kerja aparat pelaksana terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL dengan mengambil lokasi di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

Hasil penelitian diketahui bahwa kurang maksimalnya implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL dengan mengambil lokasi di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang disebabkan oleh faktor kurang efektifnya tingkat sosialisasi yang dilakukan aparat pelaksana kebijakan, kurang mendukungnya sikap kerja aparat pelaksana kebijakan dan kemampuan kerja aparat pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kemudian saran yang bisa dilakukan adalah yaitu pemberian buku perda tentang pengaturan dan pembinaan PKL kepada aparat pelaksana kebijakan dan PKL, sosialisasi yang intensif, pencantuman prosedur dan persyaratan perijinan PKL dikantor PKL.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, sosialisasi, sikap kerja dan kemampuan kerja.

ABSTRACT

The aim of the research is on behalf of knowing how big the effect of socialisation level is, the doer official attitude and the ability of the officials towards the implementation of Semarang Municipality regulation No. 11 in the year of 2000 as to the arrangement and the building of PKL by taking place on Central Semarang District.

The outcome is known that the less maximal of the implementation of Semarang Municipality No. 11 in the year of 2000 as to the arrangement and the building of PKL placing on Central Semarang District area is caused by the less effectivity of socialisation level done by the doer of the policy, the less support of the attitude of the doer of the work ability and the policy.

Based on the issue above, then the suggestion being able to be done is that the the giving of local regulation book as to the arrangement and the building of PKL toward the doer of the policy and PKL, socialisation being intensive, the implementation of the procedure and the requirement of PKL permission in PKL office.

Key Word : policy implementation, socialisation, work manner and the ability of the work

KATA PENGANTAR

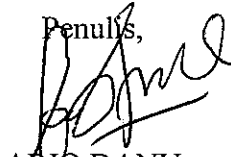
Rasa Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Pengaruh Tingkat Sosialisasi, Sikap Kerja Aparat Pelaksana dan Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, pengarahan, petunjuk serta dorongan yang telah diberikan sehingga tersusun tesis ini kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph. D selaku Ketua Program Studi MAP Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs. Sundarso, SU, selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Drs. Ari Subowo, MA selaku Dosen Pembimbing II, Ibu Dra. Hj. Endang Larasati, MS dan Dra. Hartuti Purnaweni, MPA selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan bagi penulisan tesis ini.
3. Bapak Kepala Dinas Pasar Kota Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di instansinya.
4. Bapak dan Ibunda serta teman-temanku tercinta, berkat doa restu dan dorongan dalam segala hal penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Teman-teman mahasiswa MAP Angkatan VIII Reguler Tahun 2003 yang telah belajar bersama di MAP Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang sifatnya membangun Saya terima demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

Semarang, Januari 2005

Penulis,

ARIO DANU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
RINGKASAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori	15
A. 1. Teori Implementasi George Edwards III	16
A. 2. Teori Implementasi Rina Martin dkk.....	17

A. 3. Teori Implementasi Van Metter dan Van Horn.....	20
B. pengaruh Antar Variabel Penelitian.....	24
B.1. Pengaruh Tingkat Sosialisasi (X1) terhadap Implementasi Kebijakan (Y)	24
B.2. Pengaruh Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X2) terhadap Implementasi Kebijakan (Y)	25
B.3. pengaruh Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X3) terhadap Implementasi Kebijakan (Y)	25
B.4. Pengaruh Tingkat Sosialisasi (X1), Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X2) terhadap dan Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana dengan Implementasi Kebijakan (X3).....	26
C. Pembahasan Penelitian yang Relevan	28
D. Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Rancangan Penelitian	31
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Variabel –Variabel Penelitian	32
D. 1. Klasifikasi Variabel.....	32
D. 2. Definisi Konseptual.....	33
D. 2. 1. Implementasi Kebijakan (X1)	33
D. 2. 2. Tingkat Sosialisasi (X2).....	35

D. 2. 3. Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X3)	37
D. 2. 4. Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X4)	38
D. 3. Definisi Operasional.....	39
D. 3. 1. Implementasi Kebijakan (X1).....	39
D. 3. 2. Tingkat Sosialisasi (X2)	41
D. 3. 3. Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X3)	47
D. 3. 4. Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X4)	51
E. Jenis dan Sumber Data	56
F. Instrumen Penelitian.....	56
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	56
H. Teknik Pengumpulan Data.....	60
I. Teknik Analisis Data	61
J. Teknik Pengujian Hipotesis	62
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	66
A. Identitas Responden.....	66
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	68
B. 1. Implementasi Kebijakan (Y).....	68
B. 2. Tingkat Sosialisasi (X1)	77
B. 3. Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X2).....	84
B. 4. Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X3).....	91
C. Analisis Hubungan antara Variabel (Y, X1, X2 dan X3).....	98

1. Hubungan Antara Tingkat Sosialisasi (X1) dengan Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL (Y).....	99
2. Hubungan Antara Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X2) dengan Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL (Y)	101
3. Hubungan Antara Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X3) dengan Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL (Y).....	103
D. Pengujian Hipotesis.....	105
1. Analisis Korelasi Rank Kendall antara Tingkat Sosialisasi (X1) dengan Implementasi Kebijakan Pengaturan dan PembinaanPKL (Y) dan Besarnya KD.....	107
2. Analisis Korelasi Rank Kendall antara Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X2) dengan Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL (Y) dan Besarnya KD.....	109
3. Analisis Korelasi Rank Kendall antara Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X3) dengan Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL (Y) dan Besarnya KD.....	112
4. Analisis Konkordasi Kendall antara Tingkat Sosialisasi (X1), Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X2) dan Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X3) dengan Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL (Y) dan Besarnya KD	114

E. Diskusi.....	117
BAB V PENUTUP.....	123
A. Simpulan	123
B. Saran.....	136

DAFTAR PUSTAKA

MATRIK KUESIONER

DAFTAR PERTANYAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan II. 1.	Skema Variabel-Variabel yang Berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.....	22
--------------	--	----

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1.	Data, Jumlah, Target dan Realisasi PKL Kota Semarang 1998-2003.....	8
Tabel I. 2.	Target Realisasi Retribusi PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang Tahun 2003.....	9
Tabel III. 1.	Daftar Seluruh PKL di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2003	57
Tabel III. 2.	Daftar Seluruh PKL Kategori Sampel Penelitian di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2003	58
Tabel III. 3.	Daftar Hasil Perhitungan Sampel Penelitian di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2003.....	59
Tabel IV. 1.	Responden Menurut Usia.....	67
Tabel IV. 2.	Responden Menurut Jenis Kelamin	67
Tabel IV. 3.	Responden Menurut Jenis Dagangan.....	67
Tabel IV. 4.	Tingkat Kemudahan dalam Pengurusan Ijin Usaha Dagang	68
Tabel IV. 5.	Tingkat Kemudahan dalam Mendapatkan Lokasi untuk Berjualan dari Pemerintah Kota Semarang.....	69
Tabel IV. 6.	Proses Pengaturan dan Pembinaan PKL yang dilakukan Petugas PKL.....	69
Tabel IV. 7.	Tingkat Kepuasan PKL Terhadap Pelayanan yang Diberikan Petugas.....	70
Tabel IV. 8.	Tingkat Kepatuhan Pedagang terhadap Peraturan Bongkar Pasang Tempat Berdagang.....	70

Tabel IV. 9.	Tingkat Kepatuhan Pedagang terhadap Peraturan dalam Mendirikan Dagangan di Lokasi Yang Disediakan.....	71
Tabel IV. 10.	Tingkat Kedisiplinan Pedagang dalam Membayar Retribusi.....	71
Tabel IV. 11.	Tingkat Kepatuhan Pedagang Untuk Membangun Tempat Berdagang Tidak Semi Permanen.....	72
Tabel IV. 12.	Tingkat Kepatuhan Pedagang Tidak Menempati Lokasi untuk Tempat Tinggal.....	72
Tabel IV. 13.	Tingkat Kemanfaatan Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL.....	73
Tabel IV. 14.	Tingkat Keberhasilan Peningkatan Kesadaran Pedagang Terhadap Peraturan.....	73
Tabel IV. 15.	Tingkat Keberhasilan Kebijakan Mengurangi Masalah Pedagang dalam Mendapatkan Lahan.....	74
Tabel IV. 16.	Klasifikasi Skor Variabel Implementasi Kebijakan.....	75
Tabel IV. 17.	Rekapitulasi Penilaian Variabel Implementasi Kebijakan.....	75
Tabel IV. 18.	Tingkat Kejelasan Petugas dalam Mensosialisasikan Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL.....	77
Tabel IV. 19.	Tingkat Penggunaan Bahasa oleh Petugas dalam Mensosialisasikan Kebijakan	78
Tabel IV. 20.	Tingkat Rincinya Informasi Kebijakan yang Diberikan Petugas dalam Mensosialisasikan Kebijakan	78

Tabel IV. 21.	Tingkat Kejelasan Penerimaan Pedagang dalam Sosialisasi Kebijakan	79
Tabel IV. 22.	Tingkat Kelengkapan Informasi Kebijakan yang Disampaikan Petugas dalam Mensosialisasikan Kebijakan.	79
Tabel IV. 23.	Tingkat Kelayakan Media Sosialisasi yang Digunakan oleh Petugas dalam Mensosialisasikan Kebijakan	80
Tabel IV. 24.	Tingkat Pemahaman Pedagang terhadap Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL.....	80
Tabel IV. 25.	Tingkat Ketepatan Petugas dalam Mensosialisasikan Kebijakan	81
Tabel IV. 26.	Tingkat Kesesuaian Materi Pesan Kebijakan yang Telah Disampaikan Petugas dalam Mensosialisasikan Kebijakan.	81
Tabel IV. 27.	Tingkat Penafsiran Pesan Sosialisasi yang Diterima Pedagang.....	82
Tabel IV. 28.	Klasifikasi Skor Variabel Tingkat Sosialisasi.....	83
Tabel IV. 29.	Rekapitulasi Penilaian Variabel Tingkat Sosialisasi.....	83
Tabel IV. 30.	Petugas Menarik Retribusi PKL Sesuai dengan Peraturan Kebijakan.....	84
Tabel IV. 31.	Tingkat Pengabdian Petugas dalam Pengaturan dan Pembinaan PKL.....	85
Tabel IV. 32.	Tingkat Petugas Tidak Mempengaruhi Pedagang Menentang Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL.....	85

Tabel IV. 33.	Tingkat Kesanggupan Petugas dalam Menyelesaikan Pekerjaanya Melakukan Pengaturan dan Pembinaan PKL..	86
Tabel IV. 34.	Tingkat Kesanggupan Petugas dalam Menarik Retribusi PKL.....	86
Tabel IV. 35.	Tingkat Ketaatan Petugas dalam Pengaturan dan Pembinaan PKL.....	87
Tabel IV. 36.	Tingkat Kesopanan Petugas dalam Menarik Retribusi Kepada PKL.....	87
Tabel IV. 37.	Tingkat Kejujuran Petugas dalam Menarik Retribusi PKL..	88
Tabel IV. 38.	Tingkat Kebenaran Petugas dalam Memberikan Informasi Kebijakan PKL.....	88
Tabel IV. 39.	Tingkat Kebenaran Petugas dalam Menjalankan Tugasnya Pengaturan dan Pembinaan PKL.....	89
Tabel IV. 40.	Klasifikasi Skor Variabel Sikap Kerja Aparat Pelaksana	90
Tabel IV. 41.	Rekapitulasi Penilaian Variabel Sikap Kerja Aparat Pelaksana.....	90
Tabel IV. 42.	Tingkat Kemampuan Petugas PKL dalam Menjalin Kerjasama dengan PKL	91
Tabel IV. 43.	Tingkat Kemampuan Petugas PKL dalam Melakukan Pendekatan Personal kepada PKL.....	92
Tabel IV. 44.	Tingkat Kemampuan Petugas PKL dalam Menciptakan Kesadaran Pedagang	92

Tabel IV. 45.	Tingkat Kemampuan Petugas PKL dalam Menerima dan Menganalisis Informasi dari Pedagang.....	93
Tabel IV. 46.	Tingkat Kemampuan Petugas PKL dalam Menentukan Kebijakan Penataan PKL	93
Tabel IV. 47.	Tingkat Kemampuan Petugas PKL dalam Merumuskan dan Menentukan Solusi Terhadap Permasalahan yang Dihadapi PKL	94
Tabel IV. 48.	Tingkat Kemampuan Petugas PKL dalam Menjalankan Rencana-Rencana Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL.....	94
Tabel IV. 49.	Tingkat Kemampuan Petugas PKL Memberikan Pemahaman Prosedur Pelayanan dalam Proses Perijinan PKL.....	95
Tabel IV. 50.	Tingkat Kemampuan Petugas PKL Mengerjakan Proses Perijinan untuk Menjadi PKL.....	95
Tabel IV. 51.	Tingkat Kemampuan Petugas PKL dalam Memberikan Petunjuk Teknis Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL	96
Tabel IV. 52.	Klasifikasi Skor Variabel Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana.....	97
Tabel IV. 53.	Rekapitulasi Penilaian Variabel Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana.....	97

Tabel IV. 54.	Tabulasi Silang antara Tingkat Sosialisasi (X1) dengan Implementasi Kebijakan (Y).....	99
Tabel IV. 55.	Tabulasi Silang antara Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X2) dengan Implementasi Kebijakan (Y)	101
Tabel IV. 56.	Tabulasi Silang Antara Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X3) Dengan Implementasi Kebijakan (Y).....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan persatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara beserta segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. (GBHN, 1999: 51)

Dalam pemaparan selanjutnya GBHN menerangkan mengenai perlunya di tekankan aspek kekuatan potensi lokal yang hal ini dapat dilihat dalam arah kebijakan butir g mengenai pembangunan daerah pada bagian umum point a berbunyi “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam rangka memberdayakan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat. serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Reublik Indoesia”. (GBHN, 1999: 77)

GBHN tahun 1999 inilah yang pada akhirnya menjadi dasar normatif dari lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang

Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 22 Tahun 1999 mengandung pengertian pokok mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan asas desentralisasi.

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 dalam pasal 1 butir e disebutkan bahwa : desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang kepada daerah untuk membuat kebijakan, perencanaan dan menjalankannya dengan sumber pembiayaannya sendiri.

Dalam undang-undang otonomi daerah tersebut memuat dua hal mendasar yaitu tentang kewenangan dan tugas pemerintah daerah seperti dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 dan pasal 11 ayat 2. dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan tentang kewenangan yang dimiliki daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Ayat 1 menyebutkan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Lebih lanjut, ayat 2 menyebutkan kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber

daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Kemudian dalam pasal 11 ayat 2 disebutkan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Karena semua kewenangan yang ada di atas merupakan kewenangan yang desentralitatif maka sesuai dengan pasal 8, kewenangan-kewenangan tersebut juga disertai dengan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Keadaan inilah yang pada akhirnya mengilhami daerah otonom untuk menggali PAD dalam rangka membiayai otonomi daerah. Selanjutnya PAD menurut UU No.22 Tahun 1999 pasal 79 butir a terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah

Dalam usaha untuk mendapatkan PAD tersebut kiranya ada 2 strategi yang kini digunakan pemerintah daerah untuk mengejar peningkatan retribusi daerah dan pajak daerah, yaitu :

- a. Intensifikasi, yaitu suatu upaya pengoptimalan hasil pendapatan dari sektor retribusi dan pajak tanpa penciptaan lahan atau obyek retribusi dan pajak baru.

- b. Ekstensifikasi, yaitu upaya peningkatan pendapatan retribusi dengan menciptakan obyek retribusi dan pajak baru.

Berdasarkan dua strategi tersebut dalam rangka otonomi daerah pemerintah kabupaten/ kota cenderung menggunakan strategi yang kedua yaitu bagaimana mereka meningkatkan efektifitas PAD terhadap objek pendapatan yang sudah ada sebelumnya.

Pemerintah Kota Semarang dalam rangka meningkatkan PAD- nya salah satu pendapatan yang diperoleh adalah pendapatan retribusi sewa lahan dan retribusi kebersihan PKL dimana diadakanya pungutan retribusi dan sewa lahan PKL dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pada pembiayaan otonomi daerahnya.

Di Kota Semarang masalah pengaturan dan pembinaan PKL diatur dalam Peraturan Derah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dalam BAB I Ketentuan Umum pada pasal 1 disebutkan:

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- d. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan daerah dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang digunakan bagi lalu lintas;

- e. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipasang/ dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

Sementara itu, dalam BAB II Pengaturan Tempat Usaha pada pasal 2, disebutkan sebagai berikut:

- 1). Pegadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh walikota.
- 2). Lokasi tempat dan pengaturan tempat PKL, sebagaimana dimaksud ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan walikota.
- 3). Penunjukan dan atau penempatan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah lokasi milik dan atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan atau pihak lain.

Sementara itu pada BAB III Perijinan pada pasal 4 disebutkan, antara lain:

- 1). Untuk mempergunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) setiap PKL harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari walikota.
- 2). Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan jangka waktu (1) tahun dan tidak dikenakan biaya.
- 3). Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1).
- 4). Persyaratan dan tata cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh walikota.

Dalam perda tersebut juga dikemukakan tentang point retribusi yaitu dalam BAB IV Retribusi pada pasal 5 “ Dalam menggunakan lahan Lokasi PKL ditetapkan pungutan kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Munculnya perda tersebut dirasa penting dan tepat, dengan melihat kondisi-kondisi yang ada. Mencermati masalah pengaturan dan pembinaan PKL tersebut dan dalam rangka peningkatan PAD serta dengan adanya proses pembangunan dalam berbagai dimensi sektor kehidupan yang semakin pesat dalam wilayah Kota Semarang dan tentunya sebagai akibat adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menimbulkan maraknya pertumbuhan ekonomi sektor informal yang salah satunya adalah merebaknya para Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Semarang. Adanya kondisi menjamurnya PKL tersebut juga telah mengakibatkan adanya kondisi PKL mendirikan kios PKL di atas tanah yang seharusnya menjadi tempat bagi pejalan kaki ataupun tanah-tanah lainya milik negara, mendirikan dasaran PKL dengan tidak ada ijin tertulisnya.

Menurut pemikiran penulis terhadap permasalahan tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah dari Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan dikeluarkanya kebijakan tersebut dan sekaligus memaksimalkan implementasinya untuk mengatasi permasalahan PKL di lingkup Kota Semarang.

Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL tersebut mempunyai tujuan , sebagai berikut;

1. Tujuan Umum:

Meningkatkan kesadaran PKL dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan menaati peraturan lain yang ditetapkan pemerintah.

2. Tujuan Khusus:

- a. Meningkatkan ketertiban PKL dalam menjalankan kegiatannya.
- b. Meningkatkan peran serta PKL dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- c. Meningkatkan kesadaran PKL dalam membayar retribusi.

Adapun yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut adalah PKL-PKL yang menggunakan lahan milik pemerintah atau pihak lain. Untuk itu maksud dari adanya kebijakan tersebut diharapkan PKL yang menggunakan lahan atau tanah milik pemerintah untuk kegiatan berdagang perlu untuk melakukan proses perijinan sehingga keberadaanya secara formal diakui oleh Pemerintah Kota Semarang, disiplin membayar retribusi dan beritikad baik untuk turut serta menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat mereka berdagang.

Berikut ini data mengenai sebaran PKL, target dan realisasi Kota Semarang. (Tabel 1. 1)

Tabel 1.1
DATA JUMLAH, TARGET DAN REALISASI
PKL KOTA SEMARANG 1998–2003

No	Tahun Anggaran	Jumlah PKL	Target	Realisasi	%	Selisih (Kurang – Lebih)	%
1	1998	7.091	363.320.000	320.115.00	88,11	43.205.000	11,89
2	1999	7.091	380.000.000	367.732.300	96,77	12.267.700	3,23
3	2000	10.479	506.000.000	482.612.175	95,37	23.447.825	4,63
4	2001	10.427	1.319.960.000	1.124.746.300	85,21	195.213.700	14,79
5	2002	10.198	1.557.920.000	1.347.311.570	85,39	230.608.430	14,67
6	2003	10.198	1.717.250.000	1.501.467.965	87,43	215.782.035	12,57

Sumber: UUPKL Dinas Pasar Kota Semarang, 2003

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah PKL yang tersebar di Kota Semarang cukup besar dimana dalam tahun terakhir 2003 telah mencapai 10.198 buah PKL dimana target yang ditetapkan terus meningkat padahal dari tahun 2002–2003 jumlah PKL jumlahnya relatif menurun. Dari hal tersebut bahwa Pemerintah Kota Semarang berusaha melakukan proses penarikan retribusi PKL secara intensifikasi yaitu berusaha memaksimalkan pendapatan dengan kondisi PKL yang sudah ada dan ini tentunya peran dari peraturan pemerintah tentang PKL untuk semakin dimaksimalkan dalam implementasinya dimana di satu sisi pendapatan PAD meningkat tetapi disisi lain tentunya adanya PKL yang tertib dan disiplin mematuhi peraturan pemerintah menjadi sesuatu yang penting untuk ditargetkan.

Disamping itu bahwasanya berdasarkan data yang ada pemerintah kota dalam implementasi kebijakan PKL dari tahun 1998–1999 realisasi target retribusi yang dicapai belum pernah memenuhi target yang ditetapkan dan ini pula tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah kota untuk lebih optimal dalam menerapkan peraturan ini.

Kemudian berikut ini peneliti sajikan target pendapatan dari retribusi PKL dari lokasi penelitian yang peneliti lakukan. (Tabel 1. 2)

Tabel 1. 2
TARGET REALISASI RETRIBUSI PKL
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2003

N0	Kelurahan	Jumlah PKL	Luas Dasaran (M2)	Retribusi		Besarnya Target/ Per Tahun
				Sewa Lahan/ per hari	Kebersihan/per hari	
1	Miroto	93	700	57. 675	9. 300	24. 111.000
2	Brumbungan	78	380	30. 200	7. 800	13. 680. 000
3	Jagalan	83	458	34.350	8.300	15. 354. 000
4	Kranggan	487	1960	161. 300	48. 700	75. 600. 000
5	Gabahan	103	432	32. 400	10. 300	15. 354. 000
6	Kembang Sari	204	740	59. 600	20. 400	28. 800. 000
7	Sekayu	37	311,5	23. 363	3. 700	9. 742. 000
8	Pandansari	48	252, 5	19.000	4. 800	8. 568. 000
9	Bangunharjo	44	154	11. 550	4. 400	5. 742. 000
10	Kauman	226	456	34. 200	22. 600	20. 448. 000
11	Purwodinatan	389	1405	113. 200	38. 900	54. 756. 000
12	Karangkidul	166	820	73. 400	16. 600	32. 400. 000
13	Pekunden	115	596	48. 500	11. 500	21. 600.000
14	Pindrikan kidul	41	136	10. 200	4. 100	5. 148.000
15	Pindrikan Lor	185	595	48. 100	18. 500	23. 976. 000
	Jumlah	2. 299	9. 396	757. 038	229. 900	355. 297. 680

Sumber: UUPKL Dinas Pasar Kota Semarang, 2003

Dari data di atas dapat dijelaskan, bahwa di Kecamatan Semarang Tengah jumlah PKL cukup besar dan target pendapatan yang ditetapkan pun cukup besar pula dan ini tentunya berkaitan apa yang ditetapkan dalam tujuan dari adanya peraturan tersebut untuk semakin optimal implementasinya. Dimana di satu sisi target yang ditetapkan besar tetapi disisi lain tujuan-tujuan dari adanya peraturan PKL tersebut tidaklah boleh diabaikan.

Adapun dalam implementasi kebijakan PKL Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pendelegasian kewenangan pemerintah kota ke kecamatan/ kelurahan dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL.

Bentuk kegiatan dari aplikasi peraturan PKL tersebut dari pelaksanaan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kota Semarang yang selama ini dilakukan adalah pemerintah kota melakukan proses melokalisasi PKL dalam suatu wilayah tertentu yang telah diatur dan disediakan oleh pemerintah kota, melakukan sosialisasi baik secara kolektif maupun secara individual dengan sosialisasi ke tiap-tiap PKL. Kegiatan yang lainya juga melakukan pendataan PKL dan mengorganisasikan PKL dalam suatu wadah atau organisasi PKL. Akan tetapi berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, selama ini implementasi kebijakan pembinaan PKL bisa dikatakan kurang berhasil.

Kurang berhasilnya implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari sisi pencapaian target retribusi PKL yang selama 5 tahun secara umum tidak memenuhi target yang ditetapkan, masih banyaknya kondisi PKL yang tidak teratur dalam penempatan lokasinya. Keadaan ini bisa dilihat sekitar Jalan Thamrin pada malam hari yang menempati pinggir jalan kanan kiri, di Jalan Arif Rahman Hakim dari Jalan Agus Salim sampai dengan Jalan Pemuda terlihat PKL menempati pinggir jalan keadaan ini tentunya mengganggu arus lalu lintas. Bahkan tidaklah dapat dipungkiri jika selama ini PKL banyak yang menggunakan trotoar yang fungsi utamanya bagi pejalan kaki seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Mpu Tantular, Jalan Depok, serta Jalan KH. Ahmad Dahlan. Di samping hal di atas, kurang maksimalnya pengaturan dan pembinaan PKL dalam implementasi kebijakan juga adanya kondisi pergesekan-pergesekan antar PKL yang sering terjadi biasanya persaingan dagang kondisi ini pernah muncul di Gendingan dan , Brumbungan juga dengan pihak lain selain PKL, seperti masyarakat setempat.

Kondisi kurang maksimalnya implementasi kebijakan tersebut di Kecamatan Semarang Tengah ini ternyata dilatarbelakangi oleh beberapa faktor permasalahan yaitu pertama, masih adanya sosialisasi yang kurang mantap keadaan ini disebabkan adanya komunikasi yang kurang maksimal terhadap para PKL berkaitan dengan pemberian informasi mengenai peraturan-peraturan tentang penataan PKL sehingga kondisi PKL menjadi tidak rapi, kotor dan kurang disiplin dalam menjaga lingkungannya. Jadi tidaklah beralasan jika lingkungan disekitar PKL menjadi kurang indah pemandangannya. Keadaan ini juga menimbulkan pemahaman yang salah terhadap kewajiban PKL yang hanya memenuhi kewajibannya sekedar membayar retribusi saja bahkan mereka membangun PKL memakan trotoal yang seharusnya menjadi tempat berjalanya penduduk yang melewatinya.

Keadaan tersebut dapat dilihat dari anggapan bahwa selama ini PKL hanya mengetahui kalau dirinya harus membayar pungutan retribusi saja. Mereka tidak mengetahui manfaat dan kegunaan adanya kebijakan tersebut. Seharusnya PKL sebagai masyarakat yang dikenai kebijaksanaan harus diberikan pengertian yang jelas tentang isi dari kebijaksanaan tersebut. Jadi dalam implementasinya mereka dapat melaksanakan dengan sukarela dan penuh kesadaran. Untuk itulah manfaat dari sosialisasi sangat penting dalam suatu kebijakan.

Penyebab dari rendahnya proses sosialisasi kebijakan tersebut adalah adanya hambatan-hambatan yang muncul dalam proses sosialisasi tersebut antara lain karena pada saat aparat datang untuk mendata atau memberikan pembinaan rata-rata pedagang beralasan sedang sibuk untuk melayani pembeli. Jadi tidak ada

kesempatan dari aparat untuk memberikan pengertian yang jelas terhadap tujuan program.

Selain itu UPPKL Dinas Pasar Kota Semarang mengalami kesulitan untuk melakukan sosialisasi secara kolektif hal ini terjadi disebabkan oleh adanya waktu berdagang PKL yang berlainan dan adanya penilaian yang cenderung negatif yang berupa adanya persepsi dari pedagang jika dikumpulkan hanya akan dilakukan pendataan belaka dan menaikan retribusi PKL. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa PKL selama ini cenderung tidak ambil pusing dan cenderung *stereotif* terhadap penataan dan pembinaan PKL.

Kedua, sikap aparat pelaksana yang masih pasif, sehingga PKL beranggapan kalau membayar retribusi lebih dari ketentuan akan dibiarkan saja walaupun melanggar perda tentang pengaturan dan pembinaan PKL. Gambaran mengenai pasifnya sikap aparat pelaksana, ditunjukkan perilaku aparat pelaksana yang tidak berani bertindak tegas terhadap PKL yang melanggar aturan, dimana alasan yang muncul yaitu pada permasalahan kemanusiaan. Padahal jika perilaku yang pasif tersebut tetap terjadi maka akan muncul adanya persepsi dari para PKL bahwa perilakunya selama ini adalah dianggap benar.

Ketiga, petugas PKL kurang bisa memahami tugas yang mereka kerjakan dimana mereka hanya bertugas menarik retribusi saja, disamping itu tidak memberikan keterangan yang komprehensif mengenai isi kebijakan dan sekaligus hak dan kewajiban PKL sehingga menyebabkan perilaku yang kurang mendukung kebijakan tentang PKL.

B. Identifikas Masalah dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan tersebut, maka berikut ini akan saya kemukakan identifikasi masalah berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL pada tataran implementasinya di Kecamatan Semarang Tengah masih kurang efektif.
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana program masih belum maksimal yang diberikan kepada PKL
3. Sikap aparat pelaksana kebijakan kurang mendukung implementasi kebijakan.
4. Kemampuan pelaksana program masih kurang memadai dalam melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap PKL.

Sedangkan perumusan masalah dalam rangka penelitian digunakan untuk mengungkapkan pokok-pokok pikiran secara jelas mengenai hakekat dari masalah tersebut, sehingga nantinya akan mempermudah kita dalam memahaminya. Masalah dapat muncul apabila terjadi keadaan dimana terdapat ketidaksesuaian atau kesenjangan antara apa yang diharapkan atau direncanakan dengan apa yang terjadi.

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

“Apakah kurang efektifnya implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor: 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi, sikap kerja aparat pelaksana dan kemampuan kerja aparat pelaksana?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat sosialisasi, sikap kerja aparat pelaksana dan kemampuan kerja aparat pelaksana terhadap implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah.
- b. Untuk memenuhi syarat akademis mendapat gelar strata dua (S-2) yaitu Magister Administrasi Publik.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bagi penulis untuk menambah ilmu dan pengetahuan mengenai masalah publik dan kebijakan publik serta memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kota Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam menelaah ataupun memotret sebuah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat maka dalam analisisnya di perlukan teori tertentu yang dianggap relevan dan tepat dalam usaha mengkaji suatu fenomena tersebut.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi mengemukakan pengertian teori adalah sebagai berikut:

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep” (Singarimbun dan Effendi, 1987 : 57)

Oleh karena itu dalam menelaah permasalahan publik yang merupakan fenomena sosial yang menyangkut publik maka kajian yang dilakukan berdasar pada teori tentang kebijakan publik yang secara spesifik mengkajinya dalam konteks implementasi kebijakan publik.

Penomena sosial yang akan di amati dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Teori-teori implementasi kebijakan yang akan digunakan dalam menjelaskan fenomena tersebut adalah teorinya, sebagai berikut: (1) George Edwards III, (2) Rina Martini, dkk, dan (3) Van Meter dan Van Horn.

A. 1. Teori implementasi kebijakan publik George Edwards III

Menurut teori George Edward III dalam implementasi kebijakan ada 4 variabel yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sukses atau tidaknya implementasi kebijakan, yaitu : (1) Komunikasi yang efektif, (2) Sumber-sumber, (3) Disposisi/ sikap dan (4) Struktur birokrasi. Adapun penjelasan dari konsep tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Para pelaksana harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Segala keputusan harus dikomunikasikan kepada orang-orang yang tepat. Kebijakan harus diterima para pelaksana secara jelas. Hal ini terjadi agar implementasi kebijakan publik bisa berjalan secara efektif dan efektif.

2. Sumber-sumber daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan faktor-faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi; staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas untuk melaksanakan kebijakan publik.

3. Disposisi atau sikap

Sikap merupakan suatu yang penting dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana kebijakan didasari oleh sikap yang positif terhadap kebijakan maka besar kemungkinan mereka akan dapat melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Di dalam birokrasi selalu terdapat SOP (*Standard Operating Procedures*) dan Fragmentasi. SOP merupakan rutinitas-rutinitas yang memungkinkan para pejabat publik membuat sejumlah besar keputusan umum sehari-hari dan ia merupakan jawaban terhadap keterbatasan waktu dari sumber daya pelaksana organisasi yang kompleks dan beragam. Sedangkan fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu daerah kebijakan diantara beberapa unit organisasi. SOP dan fragmentasi dapat mempengaruhi bahan-bahan dalam kebijakan, memboroskan sumber daya, meningkatkan tindakan yang diinginkan, menghambat koordinasi dan membingungkan pejabat di tingkat bawah. (dalam Winarno, 2002: 1126-154)

A.2. Teori implementasi kebijakan publik Rina Martin, dkk

Mengutip bukunya Teguh Yuwono dan Abdul Kahar Badjuri tentang Kebijakan Publik (Konsep dan Strategi) mengatakan ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kegagalan dari implementasi kebijakan

publik (Martini, 2001, Yuwono, 2001b dan Bidgman dan Davis, 2000), seperti :

a. Spesifikasi kebijakan yang tidak lengkap.

Kebijakan jarang disusun dengan lengkap, sehingga mampu mencakup semua hal. Justru kebijakan biasanya bersifat umum dimana memungkinkan diskresi dan fleksibilitas dalam implementasinya. Jika kebijakan terlalu spesifik atau terlalu membingungkan, malah implementasinya akan mengalami kesulitan. Namun demikian, karena kebijakan biasanya tidak spesifik maka memungkinkan distorsi dalam pelaksanaannya, sehingga bisa saja mengalami kegagalan. Disinilah perlunya koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan dengan baik.

b. Instansi yang tidak cocok.

Seleksi terhadap instansi-instansi yang akan mengimplementasikan sebuah kebijakan sangatlah penting. Hal ini karena mempengaruhi tingkat keahlian dan kemampuan melaksanakan sebuah kebijakan sebagaimana yang dimiliki oleh sebuah instansi yang bersangkutan. Oleh karenanya diperlukan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang terhadap seleksi ini sehingga dapat dihasilkan instansi yang memang benar-benar ahli dan mengetahuinya secara persis.

c. Tinjauan yang saling berlawanan.

Oleh karena semua instansi memiliki tujuan-tujuan yang benar-benar beranekaragam, *conflik of interest* sangat mungkin terjadi dalam implementasi kebijakan. Berbagai kepentingan yang ada dibalik setiap

lembaga sangat kental mempengaruhi bagaimana kebijakan publik diimplementasikan.

d. Insentif tidak memadai.

Insentif terhadap para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi terhadap para pelaksana kebijaka. Krena insentif yang rendah memungkinkan implementasi kebijakan berjalan sangat tidak serius dan gegabah semau mereka sendiri.

e. Ketidakjelasan arah implementasi

Adalah sangat mungkin bahwa mereka yang melaksanakan kebijakan menerima banyak intruksi yang berbeda-beda. Contoh intruksi yang berbeda-beda dan juga tidak konsisten karena satu intruksi hanya saling berlawanan (melalui Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden) dalam implementasi kebijakan UU. No. 22/1999 terhitung sejk 1 Januari 2001) merupakan bukti nyata dari *conflicting direction* ini. Akibatnya daerah menjadi bingung dan berakhir dengan implementasi sebagaimana mereka yang persepsikan sendiri. Untuk memperbaiki hal ini, perlu ditata kemabali berbagai intruksi tersebut sehingga konsisten satu sama lain.

f. Keterbatasan keahlian.

Keterbatasan dalam pemahaman dan keahlian terhadap sebuah kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Karena keterbatsan keahlian ini bisa memungkinkan distorsi kebijakan. Distorsi ini

disebabkan oleh karena penterjemah mereka sendiri terhadap kebijakan yang tersedia.

g. Sumber daya administrasi yang terbatas.

Sangat sering terjadi pemerintah pusat membuat kebijakan tetapi tidak menyediakan dan keuangan yang diperlukan Instansi pelaksana harus mencari sumber keuangan lainya atau membiarkan kebijakan itu berjalan sehingga hanyalah menghasilkan kegagalan.

h. Kegagalan komunikasi.

Sesuatu yang sulit dibantah bahwa jika tidak ada komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan maka tinggal menunggu waktu kegagalan kebijakan publik. Banyak kebijakan yang tergantung pada anatar instansi pemerintah maupun dengan stakeholder lainya. Jika ini tidak berjalan dengan baik maka mengharap keberhasilan implementasi hanyalah spekulasi semata atau keberuntungan yang tidak terduga. (dalam Badjuri dan Yuwono, 2002: 123–126)

A. 3. Teori Implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn (1975), yang disebut sebagai *A Model of the policy implementation proccess* (model proses implementasi kebijaksanaan) dikemukakan bahwa jalan yang menghubungkan kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (independen variabel) yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas itu ialah :

1. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan.
2. Sumber-sumber kebijaksanaan.
3. Ciri-ciri atau sifat Badan / Instansi pelaksana.
4. Komunikasi antar instansi terkait dan kegiatan pelaksanaan.
5. Sikap para pelaksana.
6. Lingkungan sosial ekonomi dan politik.

Penjelasan selanjutnya variabel-variabel kebijaksanaan bersangkutan dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi berkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan didalam sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan (dalam Abdul Wahab, 1997 : 79-81).

Dari paparan teori-teori tersebut di atas tersebut, penulis membangun teori penelitian tersebut yang dapat di lihat pada bagan II. 1 adalah sebagai berikut:

Bagan II. 1
 SKEMA VARIABEL-VARIABEL YANG BERHUBUNGAN DENGAN
 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN PKL DI
 KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

George Edwards III

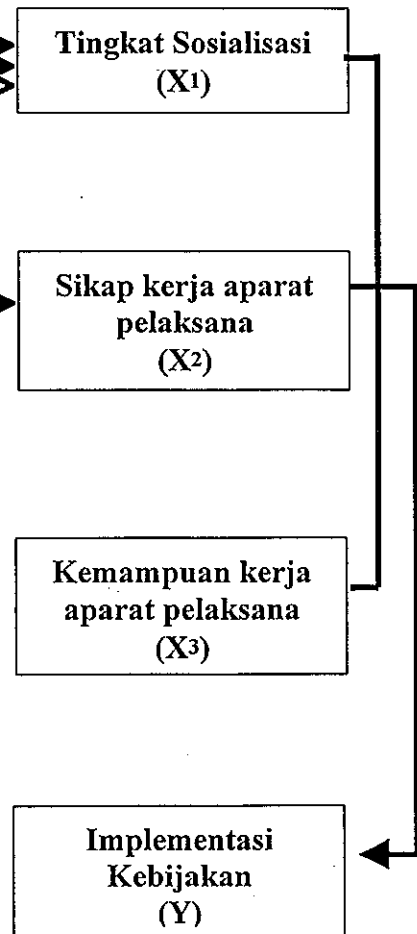
1. Komunikasi yang efektif
2. Sumber daya
3. Sikap-sikap disposisi
4. Struktur birokrasi

Rina Martini, dkk

1. Spesifikasi kebijakan yang tidak lengkap
2. Instansi yang tidak cocok
3. Tinjauan yang saling berlawanan
4. Insentif tidak memadai
5. Keterbatasan keahlian
6. Sumber daya administrasi yang terbatas
7. Kegagalan komunikasi

Van Meter & Van Horn

1. Ukuran & tujuan kebijaksanaan
2. Sumber-sumber kebijaksanaan
3. Ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana
4. Komunikasi antar instansi terkait dan kegiatan pelaksana
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial dan politik



Dari ketiga pendapat di atas mengenai teori-teori implementasi kebijakan publik, dibangun sebuah teori yang telah dikemukakan di atas sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti munculkan, kemudian kesimpulan yang dapat dimunculkan variabel-variabel dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Sebagai variabel bebas (independen variabel) untuk X_1 adalah tingkat komunikasi yang peneliti turunkan dari ketiga pendapat tersebut yaitu : (1) Komunikasi yang efektif dari Edward III, (2) Kegagalan komunikasi dari Rina Martini dkk, (3) Komunikasi antar instansi terkait dalam kegiatan pelaksanaan dari Van Meter dan Van Horn.

Untuk variabel bebas X_2 peneliti mengambil variabel sikap kerja aparat pelaksana yang peneliti turunkan dari (1) Sikap/ disposisi dari Edward III, dan (2) Sikap para pelaksana dari Van Meter dan Van Horn.

Sementara itu untuk variabel bebas X_3 peneliti mengambil variabel kemampuan kerja aparat pelaksana yang peneliti turunkan dari (1) Sumber daya dari Edwards III, (2) Keterbatasan keahlian dari Martini dkk, dan (3) Sumber-sumber kebijaksanaan dari Van Meter dan Van Horn.

B. Pengaruh Antara Variabel Penelitian

B.1. Pengaruh Tingkat Sosialisasi (X1) terhadap Implementasi Kebijakan (Y)

Dalam kaitannya dengan suatu implementasi kebijakan peranan sosialisasi sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi dengan sosialisasi yang baik akan tercipta persamaan persepsi dan pandangan dari para pelaksana dan sasaran kebijakan tentang arti, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sosialisasi yang intensif dan mendalam memungkinkan sasaran kebijakan akan mampu memahami kebijakan publik secara komprehensif sehingga mereka mampu menginternalisasikan ide-ide untuk secara sadar berperan serta mmenyukseskan implementasi kebijakan publik.

Oleh karena itu bilamana dalam implementasi kebijakan publik terjadi permasalahan yang disebabkan oleh faktor sosialisasi tentunya akan menghambat implementasi kebijakan publik itu sendiri, hal ini terjadi jika sosialisasi kurang intensif maka akan dapat menimbulkan pemahaman yang kurang terhadap kebijakan publik itu sendiri sehingga implementasi kebijakan besar kemungkinan akan terhambat. Maka dari itu dengan adanya perbaikan dalam sosialisasi kebijakan maka peluang terjadinya perbaikan dalam implementasi sangat terbuka dan terwujudnya implementasi kebijakan publik besar kemungkinan tercapai.

B. 2. Pengaruh Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X2) terhadap Implementasi Kebijakan (Y)

Sikap kerja aparat pelaksana kebijakan akan sangat menentukan dalam implementasi kebijakan publik, dimana suatu sikap yang mendukung demi suksesnya implementasi kebijakan publik akan memberikan kontribusi yang positif bagi proses dan hasil dari implementasi itu sendiri. Tetapi sebaliknya bilamana dalam implementasi kebijakan sikap aparat kurang bisa mendukung maka suksesnya implementasi kebijakan akan sulit terwujud.

Oleh karena itu, dengan terjadinya suatu usaha untuk memperbaiki sikap aparat pelaksana dalam implementasi kebijakan publik akan memberikan peluang yang positif dalam rangka semakin baiknya implementasi kebijakan publik.

B. 3. Pengaruh Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X3) terhadap Implementasi Kebijakan (Y)

Sebuah kondisi tidak adanya kemampuan kerja aparat pelaksana kebijakan yang memadai menjadikan sesuatu yang sulit tercapai mengharapkan suatu hasil yang maksimal dalam implementasi kebijakan publik Kemampuan kerja aparat pelaksana kebijakan tersebut merupakan elemen yang penting dalam ikut serta memberikan kontribusi bagi suksesnya implementasi kebijakan. Bilamana para pelaksana mempunyai kemampuan yang memadai baik secara konseptual maupun kecakapan secara teknis maka petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dalam implementasi kebijakan

akan semakin mudah untuk diterapkan dalam proses implementasi kebijakan publik itu sendiri. Kondisi ini tentunya jika terjadi akan mempunyai kontribusi yang positif bagi suksesnya implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, jika faktor terhambatnya implementasi kebijakan di sebabkan oleh adanya kemampuan yang kurang memadai dari pelaksana kebijakan kondisi ini perlu diperbaiki dalam usaha memperbaiki implementasi kebijakan demi suksesnya implementasi kebijakan publik tersebut.

B. 4. Pengaruh Tingkat Sosialisasi (X1), Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X2) dan Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X3) terhadap Implementasi Kebijakan (Y).

Sosialisasi, sikap kerja aparat pelaksana kebijakan serta kemampuan kerja pelaksana kebijakan merupakan faktor yang penting sekali dalam mendukung proses implementasi kebijakan publik. Dengan adanya sosialisasi yang intensif dan mendalam, tersedianya kemampuan kerja aparat yang memadai baik di lihat dari sisi konseptual maupun teknis serta para aparat pelaksana kebijakan yang berpandangan positif terhadap kebijakan yang ditandai perilaku mendukung kebijakan dalam implementasinya merupakan peluang yang positif bagi suksesnya implementasi kebijakan publik. Demikian pula sebaliknya bilamana ketiga faktor tidak terjadi dalam proses implementasi maka hal tersebut merupakan peluang terhambatnya proses implementasi kebijakan dan ini adalah peluang terjadinya kegagalan implementasi kebijakan publik.

Oleh karena itu, jika dalam implementasi kebijakan publik sosialisasi yang terjadi tidak intensif dan mendalam, kemampuan kerja aparat pelaksana kurang memadai serta tidak tercipta sikap aparat yang kurang positif dan mendukung kebijakan maka perbaikan terhadap ketiga faktor tersebut mutlak dilakukan mengingat ketiga faktor tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap implementasi kebijakan.

C. Pembahasan Penelitian yang Relevan

Dalam rangka memperkuat penelitian yang penulis lakukan maka berikut ini, penulis paparkan hasil penelitian terdahulu dengan fokus kebijakan tentang pengaturan dan pembinaan PKL sebagai dasar argumentatif untuk mendukung penelitian yang saya lakukan, yaitu:

1. Hasil penelitian Tusono (2002: 110) implementasi Perda No. 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Pemerintah Kota Semarang lebih banyak menyoroti tentang manajemennya. Di sebutkan dalam penelitian tersebut bahwa pro dan kontra yang terjadi dimasyarakat terhadap pengaturan PKL di Kota Semarang tergantung pada pembuat kebijakan. Dukungan publik ternyata berpengaruh terhadap keberhasilan program. Oleh karena itu perlu disusun suatu kebijakan yang berorientasi pada publik.
2. Hasil penelitian Priyono (2000: 24) dalam jurnal Seri Kajian Ilmiah, Vol 9 Nomor: 3 tahun 2000 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) upaya menanggulangi pengangguran di era krisis ekonomi, lebih banyak melihat dari sisi ekonomi yaitu pada masa krisis ekonomi ternyata PKL masih dapat bertahan hidup, sementara itu di sektor formal banyak terjadi usaha yang gulung tikar akibat krisis, serta menimbulkan kebijakan PHK terhadap para pekerja di sektor formal. Penelitian tersebut melihat implementasi kebijakan PKL sejak pertama kali diimplementasikan serta perkembangannya. Demikian pula perubahan dalam jenis bangun, letak bangunan secara keseluruhan menjadi objek penelitian khususnya mengevaluasi letak bangunan yang

menyimpang dari aturan yang berlaku serta dampaknya terhadap lingkungan setempat. (dalam Ngesti Lestari, 2002: 35–36)

Sementara itu berkaitan dengan penelitian penulis, berusaha mengkaji implementasi kebijakan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan melihat faktor–faktor tingkat sosialisasi, sikap kerja aparat pelaksana dan kemampuan kerja aparat pelaksana mempunyai pengaruh yang positif terhadap implementasi kebijakan tersebut.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, karena ia merupakan instrumen kerja dan teori. Suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Hubungan tersebut dapat dirumuskan secara eksplisit maupun secara implisit.

Selain itu mencoba menerangkan hubungan-hubungan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial, hipotesis juga merupakan suatu prediksi yang dapat diuji secara empiris (Singarimbun dan Effendi, 1989 : 46)

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis verbal:

- a. Hipotesis Mayor

- Terdapat pengaruh tingkat sosialisasi (X1), sikap kerja aparat pelaksana (X2) dan kemampuan kerja aparat pelaksana (X3) terhadap implementasi kebijakan

pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

b. Hipotesis Minor

- Terdapat pengaruh tingkat sosialisasi (X1) terhadap implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.
- Terdapat pengaruh sikap kerja aparat pelaksana (X2) terhadap implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.
- Terdapat pengaruh kemampuan kerja aparat pelaksana (X3) terhadap implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian/ Perspektif Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatori (penjelasan) karena tipe penelitian ini bermaksud untuk menyoroti hubungan variabel-variabel penelitian serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan. (Singarimbun dan Effendi, 1989 : 3)

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu mencoba mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat sosialisasi, sikap kerja aparat pelaksana dan kemampuan kerja aparat pelaksana terhadap implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

D. Variabel-variabel Penelitian/ Fenomena yang diamati

D.1. Klasifikasi Variabel

Variabel Independen	Variabel Dependen
Tingkat Sosialisasi (X1) <ul style="list-style-type: none">➤ Kejelasan➤ Kecukupan➤ Ketepatan Waktu	Implementasi Kebijakan (Y) <ul style="list-style-type: none">➤ Tingkat pelayanan kebijakan bagi PKL➤ Tingkat perubahan perilaku PKL
Sikap kerja aparat pelaksana (X2) <ul style="list-style-type: none">➤ Kesiediaan➤ Tanggung jawab➤ Ketaatan➤ Kejujuran	
Kemampuan kerja aparat pelaksana (X3) <ul style="list-style-type: none">➤ Kemampuan berinteraksi➤ Kemampuan konseptual➤ Kemampuan administratif	

D.2. Definisi Konseptual

Konsep merupakan salah satu unsur penelitian yang sangat penting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial dan fenomena alam.

Maka dapat disimpulkan bahwa definisi konsep merupakan definisi abstrak dan dapat disederhanakan dalam permasalahan yang berupa indikator-indikator yang saling berhubungan diantara variabel-variabel.

Maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

D.2.1. Implementasi Kebijakan (Y)

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan. Bahkan Udoji dengan tegas mengatakan bahwa *"the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented"* (Abdul Wahab, 2001: : 59).

Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for*

carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Dalam pemahaman penulis pada dasarnya banyak konsep-konsep yang dirumuskan para ahli dalam mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 4 tahapan *public policy*.

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan sebagai "*those actions by public or private individuals or groups that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*" (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan) (Abdul Wahab, 2001 : 65).

Sementara itu George Edward III mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai variasi tindakan yang luas yaitu membicarakan dan menyelenggarakan petunjuk, pendanaan, penjabaran informasi, menganalisa permasalahan, menolong dan membantu personil, mengumpulkan dan merencanakan reorganisasi dan lain-lain (dalam Purnaweni, 1991 : 2).

Sedangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negative effects*). (Abdul Wahab, 2001 : 65).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para pakar kebijakan publik tersebut maka dapat di rumuskan definisi konseptual dari implementasi kebijakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan tersebut dalam usaha menimbulkan dampak yang lebih baik.

D.2.2. Tingkat Sosialisasi (X1)

Kebijakan publik memerlukan semacam penyampaian informasi kepada sasaran kebijakan dengan harapan akan tercipta suatu persamaan persepsi antara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dan tentunya adanya pemahaman yang mendalam sasaran kebijakan publik sehingga mereka akan serta merta mengerti dan melakukan tindakan yang di inginkan oleh suatu kebijakan publik. Apa yang dinamakan proses pemberian informasi kebijakan pemerintah biasanya melakukan apa yang dinamakan sosialisasi.

Menurut Susanto sosialisasi ialah proses yang membantu individu melalui belajar dan menyesuaikan diri bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berfikir kelompoknya maka ia bersedia untuk mengadakan kompromi terhadap tuntutan kelompok". (Susanto, 1983 : 12)

Sedangkan menurut Gabriel A. Almond mengemukakan pendapatnya sosialisasi menunjuk pada suatu proses-proses pembentukan sikap-sikap pada pola-pola tingkah laku dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan kepada generasi berikutnya" (Almond, 1983 : 10)

Berdasarkan definisi di atas tersebut maka dapat di simpulkan definisi konseptual tingkat sosialisasi adalah proses

pembentukan sikap-sikap dan tingkat laku melalui proses belajar agar mereka bersedia untuk melakukan kompromi terhadap tuntutan kelompoknya.

D.2.3. Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X2)

Elwood Chapman (1991, 3-4) mengungkapkan bahwa sikap merupakan cara anda mengkomunikasikan suasana hati (*mood*) anda kepada orang lain serta cara anda melihat sesuatu secara mental. Sikap tidak pernah statis karena sikap merupakan perseptual yang dinamis dan sensitif. Menurut Louis Thurstone dan Charles Osgood yang dimaksud dengan sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. (Azwar, 1988: 3). Sedangkan menurut Berkowitz sikap adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) ataupun perasaan tidak mendukung objek tersebut (Azwar, 1988: 3). Kemudian menurut Gordon Allport yang dimaksud dengan sikap adalah semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu (Azwar, 1988: 3).

Pengertian aparat adalah para pegawai negeri yang bekerja di Pemerintah Kota Semarang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengaturan PKL dan aparat yang bertugas dalam melayani proses perijinan para PKL. Jadi berdasarkan pendapat dari definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan definisi

konseptual sikap kerja aparat pelaksana adalah perasaan yang dimiliki seorang pegawai negeri baik perasaan mendukung maupun tidak mendukung terhadap pemberian pelayanan, dalam hal pembinaan dan pengaturan PKL.

D.2.4. Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X3)

Istilah-istilah kemampuan biasanya menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan. Mungkin kemampuan itu dimanfaatkan/mungkin juga tidak. Ini menunjuk pada apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang dan bukan apakah ia mengerjakan pekerjaan itu. Kemampuan berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental seseorang yakni untuk menunjuk apa yang dapat dikerjakan bukan apa yang telah dikerjakan.

Sedangkan AS. Moenir mendefinisikan kemampuan sebagai berikut:

“Kemampuan dalam hubungan dengan pekerjaan adalah suatu keadaan pada seseorang yang penuh kesungguhan, berdaya guna dan berhasil melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal” (Moenir, 1988: 76)

Menurut James L. Gibson pengertian tentang tingkat kemampuan:

“Kemampuan kerja adalah sifat yang dibawa sejak lahir dan dipelajari yang memungkinkan seseorang menyelesaikan

pekerjaan/melaksanakan sesuatu yang bersifat mental maupun fisik” (Gibson, 1990: 54)

Kemampuan seseorang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilan. Pendapat ini dikemukakan oleh Richard M. Steers, bahwa pengertian kemampuan seseorang juga banyak ditentukan oleh ciri-ciri yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan, seperti kemampuan, perangai dan sifat kerjanya” (Steer, 1985: 147)

Dari pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan definisi konseptual bahwa kemampuan kerja aparat pelaksana adalah satu potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dengan penuh kesungguhan, berdaya guna dan berhasil guna.

D.3. Definisi Operasional

Maksud definisi operasional ini adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Adapun indikator dari masing-masing variabel ini adalah:

D.3.1. Implementasi Kebijakan (Y)

Coraly Bryant mengemukakan bahwa keberhasilan program kebijakan pembangunan dapat dilihat dari efisiensi program sebagai daya kerja yang mampu menciptakan:

- Seberapa jauh program mengembangkan lembaga yang mampu menyelenggarakan jasa-jasa pelayanan baru dari waktu ke waktu.
 - Keefektifan program dalam menjangkau kelompok-kelompok target yang jelas dan tertentu.
 - Banyaknya perubahan perilaku yang terjadi.
 - Apakah organisasi telah memetik pelajaran dari pengalaman proyek dan mengubah keputusan sesuai dengan tugas pembangunan.
 - Apakah program berhasil dalam menggerakkan dan mengarahkan partisipasi masyarakat serta menambah kesadaran mereka mengenai kemampuan mereka sendiri.
- (Bryant dan White, 1988 : 199)

Oleh karena itu berdasar paparan dari Coraly Briant tersebut maka penulis membuat indikator dari implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pelayanan kebijakan bagi PKL, diukur melalui:
 - Tingkat kelancaran PKL mendapat pengurusan ijin usaha untuk berdagang secara lancar.
 - Tingkat kemudahan PKL mendapatkan lahan/ lokasi untuk usaha secara mudah.

- Tingkat seberapa baik proses pengaturan dan pembinaan PKL.
 - Tingkat kepuasan PKL terhadap pelayanan petugas PKL
2. Tingkat perubahan perilaku pedagang, diukur melalui:
- Tingkat kepatuhan PKL dalam membongkar – memasang tempat dasaran
 - Tingkat kepatuhan dalam mendirikan bangunan/ lokasi di tempat yang di sediakan.
 - Tingkat kedisiplinan PKL dalam membayar retribusi.
 - Tingkat kepatuhan PKL untuk tidak membangun kios semi permanen/permanen
 - Tingkat kepatuhan tidak menempati lokasi PKL untuk tempat tinggal.
3. Hasil kebijakan, indikatornya diukur dari:
- Tingkat kemanfaatan kebijakan pengaturan dan pembinaan bagi PKL
 - Tingkat peningkatan kesadaran PKL tentang arti pentingnya kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL
 - Tingkat kebijakan mampu mengurangi masalah PKL dalam mendapatkan lahan lokasi berdagang.

D.3.2. Tingkat Sosialisasi (X1)

Berkaitan dengan pelaksanaan pengaturan dan pembinaan PKL bahwa suatu pelaksanaan kebijakan itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dengan demikian perlu adanya peran serta dari masyarakat untuk menjamin efektifitas pengaturan dan pembinaan PKL tersebut. Adanya sikap yang tidak menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan bisa menghambat terhadap efektifitas suatu kebijakan. Oleh karena itu sosialisasi adalah proses yang dapat membentuk individu melalui belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berfikir kelompoknya sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Dalam konteks kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah memerlukan suatu proses sosialisasi antara aparat kelurahan dengan pedagang. Jika hal tersebut belum dapat dilaksanakan, maka suatu pelaksanaan kebijakan tidak akan berhasil karena disini akan terhambat proses sosialisasinya dalam arti kurangnya kesadaran PKL dalam menjaga ketertiban umum dan mempengaruhi kewajibannya.

Untuk itu kiranya dalam rangka mencari indikator dari sosialisasi dapat melalui proses penyampaian informasi yang ada dari aparat pelaksana kepada PKL sehingga akan terbentuk suatu kesepahaman antara kedua belah pihak yaitu pihak yang di beri

kebijakan dengan yang memberi kebijakan. Proses penyampaian informasi tersebut adalah melalui proses komunikasi yang efektif.

Selanjutnya akan dijelaskan pula mengenai konsep komunikasi, karena proses sosialisasi dapat berhasil, bila didukung adanya praktek komunikasi yang efektif.

Keith Davis dan John W. Newstrom mengemukakan:

“Komunikasi adalah penyampaian (transfer) informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Komunikasi merupakan cara penyampaian gagasan fakta, pikiran dan nilai kepada orang lain”. (Davis dan Newstrom, 1992 : 150)

Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu informasi yang dipahami dan dimengerti oleh komunikan atau penerima informasi.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi yang efektif. Di antaranya faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kemampuan orang untuk menyampaikan yang jelas dan langsung.
2. Pemilihan dengan seksama apa yang disampaikan oleh komunikator.
3. Saluran komunikasi yang jelas dan langsung.
4. Media yang memadai untuk menyampaikan pesan.
5. Penentuan waktu dan penggunaan media yang tepat.

6. Tempat-tempat penyebaran yang memadai apabila diperlukan untuk memudahkan penyampaian pesan yang asli, tidak dikurangi, diubah, dan dalam arah yang tepat.
7. Kemampuan dan kemauan penerima untuk menerima pesan.
8. Penerimaan informasi dan penafsirannya yang tepat.
9. Penggunaan informasi yang efektif.
10. Pemberitahuan kepada pengirim mengenai hasil tindakan. (Moekijat, 1993 : 21)

Komunikasi sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL. Sedangkan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar komunikasi dapat berjalan efektif yaitu:

1. Sumber

Adalah pembuat sandi, pengirim warta, sumber komunikasi, atau komunikator yaitu pihak yang memiliki warta yang ingin disampaikan kepada pihak lain.

2. Warta

Adalah suatu pengertian yang disampaikan oleh pengirim warta kepada penerima warta.

3. Saluran

Adalah alat untuk menyampaikan warta dari sumber warta kepada penerima warta.

4. Penerima

Adalah pihak yang memperoleh warta dari pengirim warta.

5. Hasil

Komunikasi administrasi dapat menimbulkan hasil penerima warta menjadi bertambah atau berubah pengetahuannya, penerima warta berubah sikapnya, atau penerima warta dapat menjadi berubah perilakunya.

6. Umpan Balik

Adalah tanggapan atau reaksi dari penerima warta kepada pengirim warta. (Sutarto, 1991: 340)

Sedangkan unsur yang harus dipenuhi agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif seperti pendapat S. Yuwono dalam buku Ikhtisar Komunikasi dan Administrasi yaitu:

1. Kejelasan (*clarity*)

Supaya informasi dapat diterima dengan betul dan mudah maka penyampaiannya harus jelas yaitu dengan kalimat yang terang dan tidak berbelit.

2. Kecukupan (*adequacy*)

Penyampaian informasi hendaknya berpedoman pula kepada asas memadai kebutuhan atau dapat menyampaikan maksud penyampaian dengan baik dan cukup.

3. Penggunaan waktu yang setepat-tepatnya (*timing*)

Komunikator harus mempertimbangkan waktu setepat-tepatnya dalam penyampaian informasi (Yuwono, 1985: 11)

Berdasar pada konsep tersebut, maka indikator dari variabel tingkat sosialisasi adalah:

1. Kejelasan, diukur melalui:

- Tingkat kejelasan aparat dalam menyampaikan sosialisasi kebijakan.
- Tingkat penggunaan bahasa yang mudah dipahami yang digunakan oleh aparat dalam sosialisasi kebijakan.
- Tingkat kerincian penyampaian informasi kebijakan dalam memperjelas pesan/informasi sosialisasi kebijakan.
- Tingkat penerimaan secara jelas oleh PKL dalam sosialisasi kebijakan yang dilakukan aparat.

2. Kecukupan, diukur melalui:

- Tingkat PKL mendapat informasi secara lengkap tentang kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL.
- Tingkat media yang di gunakan aparat layak dalam menyampaikan sosialisasi/pesan kebijakan.
- Tingkat PKL memadai pemahamannya tentang sosialisasi/pesan kebijakan yang dilakukan aparat.

3. Ketepatan, diukur melalui:

- Tingkat ketepatan situasi ketika aparat menyampaikan sosialisasi/pesan kebijakan.
- Tingkat kesesuaian materi yang disampaikan petugas PKL dalam sosialisasi/ pesan kebijakan yang dilakukan aparat.
- Tingkat ketepatan penafsiran oleh PKL dalam sosialisasi/pesan kebijakan yang dilakukan aparat.

D.3.3. Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X2)

Hal yang perlu diperhatikan menyangkut sikap aparat dalam hal ini adalah unsur-unsur etis yang langsung menyangkut pekerjaan sehari-hari seorang pegawai yaitu yang tercantum dalam PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini menggariskan tentang cara-cara menilai prestasi pegawai meskipun tujuan utama dari butir-butir peraturan ini adalah sebagai pedoman evaluasi, tetapi dapat pula digunakan sebagai tuntunan bagi PNS tentang cara-cara kerja yang baik. Di dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang merupakan inti dari peraturan ini, ada delapan unsur penilaian pegawai negeri antara lain :

1. Kesetiaan, adalah ketaataan, pegabdian dan kesetian pada Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah. Konotasi pegabdian adalah penyumbangan pikiran dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan pribadi atau golongan. Kesetiaan dapat pula berarti tekad dan kesanggupan untuk menaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disertai penuh kesadaran dan tanggung jawab.
2. Prestasi kerja, adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja adalah: kecakapan, ketrampilan, pengalaman, kesungguhan, dan kesehatan.
3. Tanggung jawab, adalah kesanggupan seorang pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya, tepat waktu dan berani memikul resiko atas keputusan yang dibuatnya. Unsur-unsurnya adalah :
 - a). Menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat pada waktunya.
 - b). Kesalahannya tidak dilemparkan pada orang lain.
 - c). Menyimpan dan memelihara barang milik negara.
 - d). Dalam segala keadaan tetap berada di tempat.
 - e). Mengutamakan kepentingan dinas.

- f). Berani dan ikhlas memikul resiko.
4. Ketaatan, adalah kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan yang berlaku. Bagian-bagian dari ketaatan ini adalah :
- a). Mentaati peraturan perundangan yang ada.
 - b). Mentaati peraturan kedinasan dari atasan.
 - c). Memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya.
 - d). Mentaati ketentuan jam kerja serta sopan santun
5. Kejujuran, adalah ketulusan hati dalam melaksanakan serta kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
6. Kerjasama, adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna.
7. Prakarsa, adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan langkah-langkah serta melaksanakannya sesuai tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Bagian-bagian dari inisiatif ini adalah :
- a. Berkemauan memberi saran kepada atasan.

- b. Berusaha mencari tata kerja baru yang terbaik
 - c. Tanpa menunggu perintah, berkemauan melaksanakan tugas.
8. Kepemimpinan, adalah kemampuan seorang pegawai atau pejabat untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

Demikian hal-hal yang menyangkut organisasi publik pada umumnya sebagai sesuatu yang normatif yang diharapkan menjadi pedoman sebagai *Code of conduct*, sebagai *Code of ethics*, bagi semua aparat birokrasi pemerintahan dalam pelbagai bidang kehidupan masyarakat.

Melihat penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa organisasi publik tidak bisa lepas dari bagaimana sikap aparat dalam melaksanakan kerjanya dimana sudah ada ketentuan-ketentuan normatif yang menjadi acuan dalam melaksanakan kerjanya.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka penulis dapat merumuskan indikator-indikator variabel sikap kerja aparat pelaksana adalah :

1. Kesetiaan, meliputi :
 - Tingkat kesesuaian menarik retribusi sesuai dengan waktu dan biaya peraturan kebijakan kepada PKL

- Tingkat pengabdian pada pekerjaan dalam mengatur dan membina PKL .
- Tingkat seberapa besar aparat tidak mempengaruhi PKL untuk menentang kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL.

2. Tanggung jawab, meliputi :

- Tingkat kesanggupan aparat dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya mengatur dan membina PKL
- Tingkat kesanggupan aparat untuk menanggung resiko pada pekerjaannya dalam mengurus dan membina PKL

3. Ketaatan, meliputi :

- Tingkat ketaatan aparat terhadap peraturan tentang pengaturan dan pembinaan PKL dalam mengatur dan membina PKL
- Tingkat kesopanan aparat dalam menarik dana retribusi pada PKL

4. Kejujuran

- Tingkat kejujuran aparat dalam memberikan besarnya tarikan retribusi pada PKL
- Tingkat kebenarannya aparat dalam memberikan informasi tentang kebijakan kepada PKL

- Tingkat kebenarannya dalam memberikan pengaturan dan pembinaan kepada PKL

D.3.4. Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X3)

James L. Gibson menjelaskan ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang aparat untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja, yaitu:

1. Kemampuan berinteraksi yang meliputi unsur-unsur:
 - ↳ Kemampuan seorang aparat untuk menciptakan dan menjaga hubungan-hubungan pribadi.
 - ↳ Komunikasi seorang aparat untuk berkomunikasi dengan rekannya dengan efektif.
 - ↳ Kemampuan pekerja atau aparat untuk menangani konflik-konflik baik dengan orang lain maupun teman sekerjanya.
2. Kemampuan konseptual, yang meliputi unsur-unsur:
 - ↳ Kemampuan seorang aparat untuk menerima dan menganalisis informasi baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi.
 - ↳ Kemampuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
 - ↳ Kemampuan untuk melakukan perubahan dalam pekerjaan yang perlu dalam organisasi.

3. Kemampuan administratif, yang meliputi unsur-unsur:

- ↳ Kemampuan seorang aparat untuk mengembangkan dan mengikuti rencana-rencana kebijakan dan prosedur yang efektif.
- ↳ Kemampuan untuk memproses tata warkat atau kertas kerja dengan baik, teratur dan tepat waktu.
- ↳ Kemampuan untuk menggunakan pengetahuannya, peralatan-peralatan, pengalaman, dan teknis-teknis dari berbagai ilmu untuk memecahkan masalah. (Gibson, 1990: 55)

Sementara itu, menurut Wahyu Sumidjo, ada tiga kemampuan yang aplikasinya dapat dipergunakan untuk menentukan seberapa besar kemampuan yang harus dimiliki sehubungan dengan kedudukan atau jabatan yang dalam organisasi menurut Wahyu Sumidjo, yaitu:

1. Kemampuan teknik (*Technical ability*)

Yaitu keterampilan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian didalam berbagai kegiatan kerja yang memerlukan keterampilan dalam mempergunakan berbagai alat/sarana dan teknik-teknik yang bersifat khusus.

2. Human skill

Yaitu kemampuan yang didalam mencerminkan berbagai keterampilan seperti:

- a). Keterampilan bekerja sama dengan orang lain.
- b). Keterampilan menciptakan kesadaran dan rasa kebersamaan.
- c). Keterampilan menciptakan suasana kerja dimana seluruh aparat merasa aman, tidak dipaksa, tidak dicurigai, suasana kerja yang penuh kekeluargaan toleransi kerja dan saling mempercayai.

3. Conceptual dan design skill

Yaitu kemampuan pengelolaan seseorang yang berkaitan dengan kemampuan melihat segala sesuatu atau secara makro, secara system/secara sektoral, sedangkan design skill adalah kemampuan seseorang tidak hanya difokuskan melihat, tetapi juga sekaligus mampu merumuskan berbagai alternatif memecahkan permasalahan itu sendiri. (Sumidjo, 1989: 143-144)

Dengan demikian penulis dapat merumuskan indikator dari variabel kemampuan kerja para aparat pelaksana dengan mengambil pendapat dari Gibson dan Sumidjo, yaitu:

1. Kemampuan berinteraksi, diukur melalui:
 - Tingkat kemampuan aparat dalam menjalin kerjasama dengan PKL sesuai dengan bidang tugasnya.

- Tingkat kemampuan aparat dalam melakukan pendekatan personal ke-PKL dalam usaha menyelesaikan konflik antar PKL.
 - Tingkat kemampuan aparat dalam meningkatkan kesadaran PKL mengenai arti pentingnya kebijakan tentang PKL
2. Kemampuan konseptual, diukur melalui
- Tingkat kemampuan aparat dalam menerima dan menganalisis informasi dari PKL.
 - Tingkat kemampuan aparat dalam untuk menentukan kebijaksanaan penataan PKL.
 - Tingkat kemampuan aparat dalam merumuskan dan menentukan solusi terhadap masalah yang dihadapi PKL.
3. Kemampuan administratif, diukur melalui:
- Tingkat kemampuan aparat dalam menjalankan rencana-rencana kebijakan dalam pengaturan dan pembinaan PKL.
 - Tingkat kemampuan aparat dalam menerangkan prosedur kerja kepada PKL.
4. Kemampuan teknis, diukur dari:
- Tingkat kemampuan aparat dalam menyelesaikan pekerjaannya mengurus masalah perijinan PKL
 - Tingkat penguasaan PKL mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu para pelaksana kebijakan dan PKL yang terkait dengan perda pengaturan dan pembinaan PKL.

b. Sumber data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen, buku, data monografi, data statistik, laporan, peraturan-peraturan tentang PKL dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini dimana peneliti dapat memperoleh secara tidak langsung.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini menggunakan questioner sebuah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden.

G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga dan paling sedikit mempunyai sifat yang homogen atau

kurang lebih sama. Pada penelitian ini populasi penelitiannya adalah seluruh PKL di Kecamatan Semarang Tengah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Adapun sampel penelitian ini adalah:

1. Elemen Penelitian

Merupakan satuan-satuan sampel yang ada dalam populasi, yaitu satuan terkecil yang kita amati karakternya. Elemen penelitian ini adalah seluruh PKL di Kecamatan Semarang Tengah.

2. Sampling Frame

Sampling frame adalah daftar nama dari seluruh elemen penelitian. Dalam penelitian ini sampling framenya adalah daftar semua PKL Kecamatan Semarang Tengah. (Tabel III. 1)

Tabel III. 1
DAFTAR SELURUH PKL
DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH TAHUN 2003

No	Kelurahan	Jumlah PKL
1	Miroto	93
2	Brumbungan	78
3	Jagalan	83
4	Kranggan	487
5	Gabahan	103
6	Kembangsari	204
7	Sekayu	37
8	Pandansari	48
9	Bangunharjo	44
10	Kauman	226
11	Purwodinatan	389
12	Karangkidul	166
13	Pekunden	115
14	Pindrikan kidul	41
15	Pindrikan Lor	185
	Jumlah	2.299

3. Sampling fraction

Adalah pemecahan unsur-unsur atau bagian-bagian sampel menjadi bagian yang lebih kecil. Mengingat jumlah sampel penelitian yang banyak mencapai 2. 299 PKL maka sampel penelitian ini akan dipecah-pecah kedalam sampel yang lokasi PKL-nya mencapai 200 ke atas buah PKL saja. Adapun lokasi yang besar sampelnya mencapai 200 ke atas PKL adalah sebagai berikut: (Tabel III. 2)

Tabel III. 2
DAFTAR SELURUH PKL KATEGORI SAMPEL PENELITIAN
DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH TAHUN 2003

No	Kelurahan	Jumlah PKL
1	Kranggan	487
2	Kembangsari	204
3	Kauman	226
4	Purwodinatan	389
	Jumlah	1306

3. Sampling size

Sampling size adalah prosentase besarnya sampel yang akan diambil. Bisa dinyatakan dalam prosentase dahulu, baru dihitung besar riilnya berapa. Dalam penelitian ini, sampling size sebesar 5% dari 1306 pedagang yang terbagi dalam empat kelurahan yang besar persebaran sampelnya mencapai diatas 200 sampel .

Pendapat beberapa peneliti menyatakan besarnya sampel tidak boleh kurang dari 10%, tetapi ada pula yang menyatakan sampel minimal 5% dari jumlah populasi. Sutrisno Hadi menyatakan bahwa tidak ada ukuran yang baku dalam menentukan besarnya jumlah sampel. Dikatakan bahwa semakin besar sampel diambil maka semakin kecil pula kesalahan

terhadap nilai populasi yang diperoleh. Sehingga sampel yang besar cenderung memberi praduga yang lebih mendekati nilai sesungguhnya (Singarimbun, 1984 : 151)

Tabel III. 3
DAFTAR HASIL PERHITUNGAN SAMPEL PENELITIAN
DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH TAHUN 2003

No	Kelurahan	Jumlah PKL	Hasil Hitung
1	Kranggan	487 X 5%	24,35
2	Kembangsari	204 X 5%	10,2
3	Kauman	226 X 5 %	11,3
4	Purwodinatan	389 x % %	19,45
	Jumlah	1306	64

Berdasarkan penghitungan pada sampling size maka besarnya sampel dalam penelitian tersebut adalah sebanyak 60 responden/ PKL.

d. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Soetrisno Hadi, ada dua tehnik pengambilan sampel yaitu: secara random atau tanpa pandang bulu. Secara random adalah teknik pengambilan sampel semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel, sedangkan non random yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. (Soetrisno Hadi, 1993: 25).

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling dengan pertimbangan didasarkan pada lokasi dan respondenya.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap obyek penelitian agar diperoleh data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bentuk kegiatannya yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai kondisi-kondisi yang terjadi diseperti lokasi PKL dan mencatat fenomena-fenomena yang muncul yang menunjukkan adanya kurang maksimalnya implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL.

2. Interview (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara terhadap objek yang terkait langsung dalam penelitian ini. Wawancara tersebut dilakukan dengan kasubid Pengaturan dan Pembinaan PKL Dinas Pasar Kota Semarang, Pegawai Kecamatan Semarang Tengah kepala seksi urusan PKL serta PKL itu sendiri.

3. Kuesioner (daftar pertanyaan)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Kuesioner ini diberikan kepada 60 orang PKL dilingkup wilayah Semarang Tengah.

4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku dan catatan lainnya yang ada relevansi dengan penelitian ini.

I. Teknik Analisis Data

Terdapat dua analisis yaitu secara kuantitatif dan kualitatif.

a. Analisis data kualitatif

Teknik ini dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Analisa kualitatif dimaksudkan untuk memperdalam analisa kuantitatif.

b. Analisa data kuantitatif

Yaitu analisa data yang digunakan untuk menganalisa data yang berupa angka-angka dalam prosentase. Artinya, analisis ini untuk mengetahui secara statistik pengaruh antara variabel bebas dan terikat, sehingga selanjutnya digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis.

Dalam penelitian ini analisis datanya dilakukan secara kuantitatif untuk menguji hipotesis yang diajukan.

J. Teknik Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis menggunakan uji statistik dengan rumus-rumus yang digunakan adalah:

a. Koefisien Korelasi Rank Kendall

Koefisien ini digunakan untuk menguji hipotesis minor, yaitu tingkat asosiasi atau hubungan antara variabel X_1 dengan Y atau X_2 dengan Y dan X_3 dengan Y , adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\tau = \frac{S}{\frac{1}{2}N(N-1)}$$

Dimana:

τ = Koefisien korelasi Rank Kendall

S = Skor

N = Jumlah responden

Apabila terdapat ranking yang sama atau kembar pada observasi skor variabel X dan Y , akan berakibat mengubah pembagi pada rumus di atas sehingga rumus Rank Kendall menjadi: (Siegel Sidney, 1994: 228)

$$\tau = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - T_x} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}N(N-1) - T_y}}$$

Dimana:

τ = Koefisien korelasi Rank Kendall

S = Skor

N = Banyaknya obyek atau individu yang diurutkan pada X dan Y

T_x = $\frac{1}{2} \sum t(t-1)$, t adalah banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka sama pada variabel X

T_y = $\frac{1}{2} \sum t(t-1)$, t adalah banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka sama pada variabel Y

Karena N lebih besar dari 10 angka, dapat dianggap berdistribusi normal oleh sebab itu dalam pengujian signifikansinya harga koefisien korelasi rank Kendall di atas terlebih dahulu didistribusikan ke dalam rumus berdistribusi berikut:

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

Kemudian harga Z dikonsultasikan dengan tabel untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila $Z_0 > Z_t$ pada taraf signifikansi 1% berarti sangat signifikan, hipotesis diterima.
2. Apabila $Z_0 > Z_t$ pada taraf signifikansi 5% berarti signifikan, hipotesis diterima.
3. Apabila $Z_0 < Z_t$ pada taraf signifikansi 5% berarti tidak signifikan, hipotesis ditolak.

b. Koefisien Konkordansi Kendall (W)

Koefisien ini digunakan untuk mengukur derajat asosiasi antara variabel X_1 , X_2 dan X_3 dengan Y secara bersama-sama melalui pengukuran terhadap himpunan-himpunan ranking masing-masing variabel yang diasosiasikan secara bersama-sama.

Untuk menghitung harga W adalah dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$W = \frac{S}{\frac{1}{12}k^2(N^3 - N) - k\sum T}$$

Dimana:

$$T = \frac{\sum(t^3 - t)}{12}$$

Keterangan:

- W = Koefisien Konkordansi Rank Kendall
- S = Hasil Observasi ranking tiap variabel
- k = Banyaknya himpunan ranking perjenjang
- N = Banyaknya obyek atau individu yang diberi ranking
- T = Jumlah harga-harga T untuk semua ranking
- t = Banyaknya observasi dalam suatu kelompok yang memperoleh angka sama untuk suatu ranking tertentu.

Untuk signifikansinya dipergunakan rumus:

$$X^2 = k(N-1)W$$

Dimana:

$$X^2 = \text{test chi square}$$

- k = Banyaknya himpunan ranking perjenjangan
- N = Banyaknya obyek atau individu yang diberi ranking
- W = Koefisien Konkordansi Rank Kendall

Kemudian hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan harga kritis chi kuadrat dengan rumus $df = N-1$ adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Apabila $X_0^2 > X_1^2$ pada taraf signifikansi 1% berarti sangat signifikan, hipotesis diterima.
2. Apabila $X_0^2 > X_1^2$ pada taraf signifikansi 5% berarti signifikan, hipotesis diterima.
3. Apabila $X_0^2 < X_1^2$ pada taraf signifikansi 5% berarti tidak signifikan, hipotesis ditolak.

c. Koefisien Determinan (KD)

Digunakan untuk mengetahui berapa persen (%) pengaruh masing-masing dari variabel X terhadap variabel Y dan pengaruh variabel-variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

- ◆ $KD_{XY} = (t_{XY})^2 \cdot 100 \%$
- ◆ $KD_{X_1X_2X_3.Y} = (W)^2 \cdot 100 \%$
- ◆ Dimana: KD= Koefisien Determinan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan disajikan data yang diperoleh oleh peneliti yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Unit analisis dari penelitian ini adalah implementasi Perda No. 11 Tentang Pengaturan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang yang merupakan objek penelitian ini dengan lokasi di Kecamatan Semarang Tengah. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 60 orang Pedagang Kaki Lima (PKL). Data yang disajikan ini akan dijadikan sebagai bahan analisis data dan pengujian hipotesis pada bab selanjutnya.

Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang meliputi data mengenai identitas responden, implementasi kebijakan, tingkat sosialisasi, sikap kerja aparat pelaksana, dan kemampuan kerja aparat pelaksana.

A. Identitas Responden

Data identitas responden disajikan untuk mengetahui keterangan yang ada pada objek penelitian. Identitas responden dilakukan dengan membagi responden ke dalam kategori usia dan jenis kelamin. Secara lebih jelas, identitas responden dapat dilihat dalam tabel-tabel yang ada di bawah ini

Tabel IV.1
RESPONDEN MENURUT USIA

Kategori Jawaban (Tahun)	Frekuensi	Persentase
21-30	7	11,67 %
31-40	20	33,33 %
41-50	18	30 %
51-60	12	20 %
61 tahun keatas	3	5 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan identitas responden

Dari tabel IV.1, dapat dilihat bahwa identitas responde menurut umur mayoritas responden berusia 31-40 tahun sebanyak 20 responden (33,33 %) dan yang terkecil berusia 61 tahun keatas sebanyak 3 orang (5%).

Tabel IV.2
RESPONDEN MENURUT JENIS KELAMIN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	45	75 %
Perempuan	15	25 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan identitas responden

Dari tabel IV.2, dapat dilihat sebagian besar responden menurut jenis kelamin sebagian besar berjenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 45 orang (75 %) dan lainnya berjenis kelamin adalah wanita sebanyak 15 orang (25 %)

Tabel IV.3
RESPONDEN MENURUT JENIS DAGANGAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Penjual rokok	11	18,33 %
Penjual makanan	25	41,67 %
Penjual buah	9	15 %
Penjual gorengan	6	10 %
Lainnya	9	15 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan identitas responden

Dari tabel IV.3, dapat dilihat bahwa identitas responden menurut jenis dagangan sebagian besar responden berjualan makanan sebanyak 25 responden (41, 67 %) dan yang terkecil penjual gorengan sebanyak 6 responden (10 %).

B. Deskripsi Variabel Penelitian

B.1. Implementasi Kebijakan (Y)

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan oleh aparaturnya birokrasi untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Disini akan disajikan data dari masing-masing indikator implementasi kebijakan dari hasil pengisian kuesioner.

Tabel IV. 4
TINGKAT KEMUDAHAN
DALAM PENGURUSAN IJIN USAHA DAGANG

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat mudah	4	6, 7 %
Mudah	20	33, 33 %
Sulit	30	50 %
Sulit sekali	6	10 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.1

Dari tabel IV. 4, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari tingkat kemudahan dalam pengurusan ijin usaha dagang sebagian besar responden menjawab sulit dan sulit sekali sebesar 60 %.

Tabel IV.5
TINGKAT KEMUDAHAN
DALAM MENDAPATKAN LOKASI UNTUK BERJUALAN
DARI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat mudah	2	3,3 %
Mudah	20	33,33 %
Sulit	35	58,3 %
Sulit sekali	3	5 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.2

Tabel IV.5 dapat dijelaskan bahwa dilihat dari tingkat kemudahan dalam mendapatkan lokasi untuk berjualan dari Pemerintah Kota Semarang sebagian besar responden menjawab sulit dan sulit sekali sebesar 63,3%.

Tabel IV.6
PROSES PENGATURAN DAN PEMBINAAN PKL
YANG DILAKUKAN PETUGAS PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	2	3,33 %
Baik	22	36,67 %
Kurang baik	30	50 %
Tidak baik	6	10 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.3

Dari tabel IV. 6, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari proses pengaturan dan pembinaan PKL oleh petugas PKL sebagian besar responden menjawab kurang baik dan tidak baik sebesar 60 %.

Tabel IV.7
TINGKAT KEPUASAN PKL
TERHADAP PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH PETUGAS

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat puas	3	5 %
Puas	23	38,33 %
Kurang puas	25	41,67 %
Tidak puas	9	15 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.4

Dari tabel IV.7, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari tingkat kepuasan PKL terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas sebagian besar responden menjawab kurang puas dan tidak puas sebesar 56,67 %.

Tabel IV.8
TINGKAT KEPATUHAN PEDAGANG TERHADAP PERATURAN
BONGKAR PASANG TEMPAT BERDAGANG

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat mematuhi	4	6,7 %
Mematuhi	19	31,67 %
Kurang mematuhi	33	55 %
Tidak mematuhi	4	6,67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.5

Dari tabel IV. 8, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden dilihat dari tingkat kepatuhan pedagang terhadap peraturan bongkar pasang tempat berdagang sebagian besar responden menjawab kurang mematuhi dan tidak mematuhi sebesar 61,67%.

Tabel IV. 9
TINGKAT KEPATUHAN PEDAGANG TERHADAP PERATURAN DALAM
MENDIRIKAN DAGANGAN DI LOKASI YANG DISEDIAKAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat mematuhi	3	5 %
Mematuhi	23	38, 33 %
Kurang mematuhi	29	48, 33 %
Tidak mematuhi	5	8, 33 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.6

Dari tabel IV.9, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kepatuhan pedagang terhadap peraturan dalam mendirikan dagangan di lokasi yang disediakan sebagian besar responden menjawab kurang mematuhi dan tidak mematuhi sebesar 56, 66 %.

Tabel IV.10
TINGKAT KEDISIPLINAN PEDAGANG
DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat disiplin	5	8,33 %
Disiplin	21	35 %
Kurang disiplin	30	50 %
Tidak disiplin	4	6,67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.7

Dari tabel IV. 10, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kedisiplinan pedagang dalam membayar retribusi sebagian besar responden menjawab kurang disiplin dan tidak disiplin sebesar 56, 67 %.

Tabel IV.11
TINGKAT KEPATUHAN PEDAGANG UNTUK MEMBAGUN TEMPAT
BERDAGANG TIDAK SEMI PERMANEN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat mematuhi	2	3, 33 %
Mematuhi	25	41, 66 %
Kurang mematuhi	27	45 %
Tidak mematuhi	6	10 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.8

Dari tabel IV.11, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kepatuhan pedagang untuk membangun tempat berdagang tidak semi permanen sebagian besar responden menjawab kurang mematuhi dan tidak mematuhi sebesar 55 %.

Tabel IV.12
TINGKAT KEPATUHAN PEDAGANG TIDAK MENEMPATI LOKASI
UNTUK TEMPAT TINGGAL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat mematuhi	2	3, 33 %
Mematuhi	24	40 %
Kurang mematuhi	27	45 %
Tidak mematuhi	7	11, 67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 9

Dari tabel IV.12, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kepatuhan pedagang tidak menempati lokasi berjualan untuk tempat tinggal sebagian besar responden menjawab kurang mematuhi dan tidak mematuhi sebesar 56, 67 %.

Tabel IV.13
TINGKAT KEMANFAATAN
KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat bermanfaat	3	5 %
Bermanfaat	23	38,33 %
Kurang bermanfaat	26	43,33 %
Tidak bermanfaat	8	13,33 %
Jumlah	60	100%

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.10

Dari tabel IV.13, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kemanfaatan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebagian besar responden menjawab kurang bermanfaat dan tidak bermanfaat sebesar 66,66 %.

Tabel IV.14
TINGKAT KEBERHASILAN PENINGKATAN KESADARAN PEDAGANG
TERHADAP PERATURAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat meningkatkan	4	6,67 %
Meningkatkan	21	35 %
Kurang Meningkatkan	28	46,67 %
Tidak meningkatkan	7	11,67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.11

Dari tabel IV.14, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat keberhasilan peningkatan kesadaran pedagang terhadap peraturan sebagian besar responden menjawab kurang meningkatkan dan tidak meningkatkan sebesar 58,34 %.

Tabel IV.15
TINGKAT KEBERHASILAN KEBIJAKAN MENGURANGI MASALAH
PEDAGANG DALAM MENDAPATKAN LAHAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat mengurangi	6	10 %
Mengurangi	20	33,33 %
Kurang mengurangi	27	45 %
Tidak mengurangi	7	11,67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.12

Dari tabel IV.15, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat keberhasilan kebijakan mengurangi masalah pedagang dalam mendapatkan lahan sebagian besar responden menjawab kurang mengurangi dan tidak mengurangi sebesar 56,67 %.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel implementasi kebijakan maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

i = Interval kelas

R = Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

k = Jumlah kelas

Dari rumus diatas maka didapat $i = 38-17 = 16/ 4 = 4$, maka $i = 4$.

Pengelompokan skor tabel untuk variabel implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.16
 KLASIFIKASI SKOR VARIABEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Kategori Jawaban	Notasi	Kelas Interval
Rendah	R	22-25
Kurang Tinggi	KT	26-29
Cukup Tinggi	CT	30-33
Tinggi	T	34-38

Berdasarkan tabel IV. 16 dapat disusun rekapitulasi variabel implementasi kebijakan dari data yang disajikan tersebut pengelompokan kategori sebagai berikut :

Tabel IV.17
 REKAPITULASI PENILAIAN
 VARIABEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rendah (R)	11	18, 33 %
KurangTinggi (KT)	25	41, 67 %
Cukup Tinggi(CT)	18	30 %
Tinggi (T)	6	10 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no 1-12

Dari Tabel IV.17 tentang rekapitulasi di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah masih belum maksimal keberhasilannya, hal ini ditunjukkan dari skor rekapitulasi variabel implementasi kebijakan mayoritas sebesar 60, 40 % kurang tinggi dan rendah. Kemudian mengenai keberhasilan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL bisa dilihat dari skor rekapitulasi variabel implementasi dengan kategori jawaban cukup tinggi 39, 60 %.

Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program atau kebijakan dapat dilihat baik buruknya pelaksanaan kebijakannya serta ditambah dengan baik

buruknya kebijakan tersebut. Apabila pelaksanaan kebijakan dan kebijakan tersebut baik maka secara otomatis keberhasilan kebijakan tersebut akan baik ataupun sebaliknya.

B. 2. Tingkat Sosialisasi (X2)

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu kebijakan, peranan sosialisasi sangat penting dan dibutuhkan. Dengan sosialisasi yang baik akan tercipta suatu pengetahuan dari pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai arti, tujuan dan sasaran dari adanya kebijakan tersebut sehingga tujuan kebijakan yang direncanakan akan tercapai. Di bawah ini akan disajikan data (lihat lampiran II) dari masing-masing indikator komunikasi dari hasil pengisian kuesioner.

Tabel IV.18
TINGKAT KEJELASAN PETUGAS DALAM MENSOSIALISASIKAN
KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PEMBINAAN PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat jelas	4	6,67 %
Jelas	25	41,67 %
Kurang jelas	27	45 %
Tidak jelas	4	6,67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.13

Dari tabel IV.18, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai sebagian tingkat kejelasan petugas dalam mensosialisasikan kebijakan pengaturan dan pembinaan sebagian besar responden menjawab kurang jelas dan tidak jelas sebesar 51,67 %.

Tabel IV.19
TINGKAT PENGGUNAAN BAHASA OLEH PETUGAS DALAM
MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat mudah dipahami	1	1,67 %
Mudah dipahami	25	41,67 %
Kurang mudah dipahami	27	45 %
Tidak mudah dipahami	7	11,67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.14

Dari tabel IV.19, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat penggunaan bahasa oleh petugas dalam mensosialisasikan kebijakan sebagian besar responden menjawab kurang mudah dipahami dan tidak mudah dipahami sebesar 56,67 %.

Tabel IV. 20
TINGKAT RINCINYA INFORMASI KEBIJAKAN YANG DIBERIKAN
PETUGAS DALAM SOSIALISASI KEBIJAKAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat rinci	1	1,67 %
Rinci	25	41,67 %
Kurang rinci	33	55 %
Tidak rinci	1	1,67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.15

Dari tabel IV.20, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat rincinya informasi kebijakan yang diberikan petugas dalam sosialisasi kebijakan sebagian besar responden menjawab kurang rinci dan tidak rinci sebesar 56,67 %.

Tabel IV.21
TINGKAT KEJELASAN PENERIMAAN PEDAGANG DALAM
SOSIALISASI KEBIJAKAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat jelas	2	3,33 %
Jelas	21	35 %
Kurang jelas	25	41,67 %
Tidak jelas	12	20 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.16

Dari tabel IV. 21, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kejelasan penerimaan pedagang dalam sosialisasi kebijakan sebagian besar responden menjawab kurang jelas dan tidak jelas sebesar 61,67 %.

Tabel IV. 22
TINGKAT KELENGKAPAN INFORMASI KEBIJAKAN YANG DIBERIKAN
PETUGAS DALAM SOSIALISASI KEBIJAKAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat lengkap	3	5 %
Lengkap	20	33,33 %
Kurang lengkap	32	53,33 %
Tidak lengkap	5	8,33 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.17

Dari tabel IV. 22, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kelengkapan informasi kebijakan yang diberikan petugas dalam sosialisasi kebijakan sebagian besar responden menjawab kurang lengkap dan tidak lengkap sebesar 61,66 %.

Tabel IV. 23
TINGKAT KELAYAKAN MEDIA SOSIALISASI YANG DIGUNAKAN
OLEH PETUGAS DALAM SOSIALISASI KEBIJAKAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat layak	3	5 %
Layak	24	40 %
Kurang layak	27	45 %
Tidak layak	6	10 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.18

Dari tabel IV. 23, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kelayakan media sisialisasi yang digunakan oleh petugas dalam sosialisasi kebijakan sebagian besar responden menjawab kurang layak dan tidak layak sebesar 55 %.

Tabel IV. 24
TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP KEBIJAKAN
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat memadai	6	10 %
Memadai	24	40 %
Kurang memadai	24	40 %
Tidak memadai	6	10 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.19

Dari tabel IV. 24, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat pemahaman pedagang terhadap kebijakan pengaturan dan pembinaan pedagang masing-masing responden menjawab kurang memadai dan tidak memadai sebesar 50 % serta memadai dan sangat memadai sebesar 50 % .

Tabel IV. 25
TINGKAT KETEPATAN PETUGAS
DALAM MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat tepat	3	5 %
Tepat	24	40 %
Kurang tepat	28	46, 67 %
Tidak tepat	5	8, 33 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.20

Dari tabel IV. 25, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai ketepatan petugas dalam mensosialisasikan kebijakan sebagian besar responden menjawab kurang tepat dan tidak tepat sebesar 55 %.

Tabel IV. 26
TINGKAT KESESUAIAN MATERI PESAN KEBIJAKAN YANG TELAH
DISAMPAIKAN PETUGAS DALAM SOSIALISASI KEBIJAKAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat sesuai	4	6, 67 %
Sesuai	23	38, 33 %
Kurang sesuai	27	45 %
Tidak sesuai	6	10 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.21

Dari tabel IV. 26, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kesesuaian materi pesan kebijakan yang telah disampaikan petugas dalam sosialisasi kebijakan sebagian besar responden menjawab kurang sesuai dan tidak sesuai sebesar 55 %.

Tabel IV. 27
TINGKAT PENAFSIRAN PESAN SOSIALISASI
YANG DITERIMA PEDAGANG

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat bisa	4	1, 67 %
Bisa	20	33, 33 %
Kurang bisa	32	53, 33 %
Tidak bisa	4	6, 67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.22

Dari tabel IV. 27, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat penafsiran pesan sosialisasi yang diterima sebagian besar responden menjawab kurang bisa dan tidak bisa sebesar 60 %.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel sosialisasi maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

i = Interval kelas

R= Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

k = Jumlah kelas

Dari rumus diatas maka didapat $i = 33-17 = 16/4 = 4$, maka **i** = .

Pengelompokan skor tabel untuk variabel sosialisasi adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 28
 KLASIFIKASI SKOR VARIABEL TINGKAT SOSIALISASI

Kategori Jawaban	Notasi	Kelas Interval
Rendah	R	17-20
Kurang Tinggi	KT	21-24
Cukup Tinggi	CT	25-28
Tinggi	T	29-33

Berdasarkan tabel IV. 28 dapat disusun rekapitulasi variabel sosialisasi, berdasarkan data yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel IV. 29
 REKAPITULASI PENILAIAN VARIABEL TINGKAT SOSIALISASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
Rendah (R)	9	15 %
Kurang Tinggi (KT)	28	46, 67 %
Cukup Tinggi (CT)	16	26, 67 %
Tinggi (T)	7	11, 67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.13-22

Dari tabel rekapitulasi di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh petugas dalam menyampaikan pesan tentang kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah mempunyai tingkat sosialisasi yang kurang mendukung implementasi kebijakan, hal ini terlihat dari nilai skor rekapitulasi variabel tingkat sosialisasi yang mayoritas kurang tinggi dan rendah sebesar 61, 67 %. Kemudian tingkat keberhasilan tingkat sosialisasi yang mendukung implementasi kebijakan hanya mencapai cukup tinggi dan tinggi sebesar 48, 33 %.

Oleh karena itu dimasa yang akan datang perlu kiranya petugas mensinergiskan langkah bersama sesuai tanggung jawab masing-masing secara

proporsional agar dapat memaksimalkan implementasi kebijakan tentang kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL.

B. 3. Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X2)

Dalam suatu pelaksanaan Perda harus didasari oleh sikap yang baik oleh aparat yang berwenang, Ini dilaksanakan untuk memudahkan hubungan dengan penerima program supaya penerima program dapat dengan mudah menerima program dan aparat pelaksana dapat bekerja dengan baik. Di bawah ini akan disajikan data dari masing-masing indikator komunikasi dari hasil pengisian kuesioner.

Tabel IV. 30
PETUGAS MENARIK RETRIBUSI PKL
SESUAI DENGAN PERATURAN KEBIJAKAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat sesuai	3	5 %
Sesuai	23	38,33 %
Kurang sesuai	30	50 %
Tidak sesuai	4	6,67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.23

Dari tabel IV. 30, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai petugas menarik retribusi sesuai dengan peraturan kebijakan sebagian besar responden menjawab kurang sesuai dan tidak sesuai sebesar 56,67 %.

Tabel IV. 31
TINGKAT PENGABDIAN PETUGAS
DALAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	3	5 %
Baik	23	38,33 %
Kurang baik	27	45 %
Tidak baik	7	11,67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 24

Dari tabel IV. 31, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat pengabdian petugas dalam pengaturan dan pembinaan PKL sebagian besar responden menjawab kurang baik dan tidak baik sebesar (56,67 %).

Tabel IV. 32
TINGKAT PETUGAS TIDAK MEMPENGARUHI PEDAGANG
UNTUK TIDAK MENENTANG KEBIJAKAN
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat mempengaruhi	4	6,67 %
Mempengaruhi	15	25 %
Kurang mempengaruhi	32	53,33 %
Tidak mempengaruhi	9	15 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 25

Dari tabel IV. 32, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat petugas tidak mempengaruhi pedagang menentang kebijakan dan pengaturan pedagang sebagian besar responden menjawab kurang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi sebesar (68,33 %).

Tabel IV. 33
TINGKAT KESANGGUPAN PETUGAS DALAM MENYELESAIKAN
PEKERJAANNYA DALAM PENGATURAN PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat sanggup	4	6,67 %
Sanggup	21	35 %
Kurang sanggup	26	43,33 %
Tidak sanggup	9	15 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.26

Dari tabel IV. 33, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai kesanggupan petugas dalam menyelesaikan pekerjaannya dalam pengaturan PKL sebagian besar responden menjawab kurang sanggup dan tidak sanggup sebesar (58,33 %).

Tabel IV. 34
TINGKAT KESANGGUPAN PETUGAS
DALAM MENARIK RETRIBUSI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat sanggup	2	3,33 %
Sanggup	25	41,67 %
Kurang sanggup	28	46,67 %
Tidak sanggup	5	8,33 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 27

Dari tabel IV. 34, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kesanggupan petugas dalam menarik retribusi sebagian besar responden menjawab kurang sanggup dan tidak sanggup (55 %).

Tabel IV. 35
TINGKAT KETAATAN PETUGAS
DALAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat taat	2	3,33 %
Taat	24	40 %
Kurang taat	29	48,33 %
Tidak taat	5	8,33 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 28

Dari tabel IV. 35, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat ketaatan petugas terhadap pengaturan dan pembinaan PKL sebagian besar responden menjawab kurang taat dan tidak taat sebesar (56,66 %).

Tabel IV. 36
TINGKAT KESOPANAN PETUGAS
DALAM MENARIK RETRIBUSI KEPADA PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat sopan	4	6,67 %
Sopan	25	41,67 %
Kurang sopan	25	41,67 %
Tidak sopan	6	10 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 29

Dari tabel IV. 36, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kesopanan petugas dalam menarik retribusi PKL kepada pedagang sebagian besar responden menjawab kurang sopan dan tidak sopan sebesar (51,67 %).

Tabel IV. 37
TINGKAT KEJUJURAN PETUGAS
DALAM PENARIKAN RETRIBUSI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat berterus terang	2	3,33 %
Berterus terang	24	40 %
Kurang berterus terang	31	51,67 %
Tidak berterus terang	3	5 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 30

Dari tabel IV. 37, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kejujuran petugas dalam penarikan retribusi sebagian besar responden menjawab kurang berterus terang dan tidak berterusterang sebesar (56,67 %).

Tabel IV. 38
TINGKAT KEBENARAN PETUGAS DALAM MEMBERIKAN
INFOMASI TENTANG KEBIJAKAN PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat benar	1	1,67 %
Benar	24	40 %
Kurang benar	32	53,33 %
Tidak benar	3	5 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 31

Dari tabel IV. 38, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kebenaran petugas dalam memberikan informasi tentang kebijakan PKL sebagian besar responden menjawab kurang benar dan tidak benar sebesar (58,33 %).

Tabel IV. 39
TINGKAT KEBENARAN PETUGAS DALAM MENJALANKAN
TUGASNYA PENGATURAN DAN PEMBINAAN PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat benar	6	10 %
Benar	22	36, 67 %
Kurang benar	28	46, 67 %
Tidak benar	4	6, 67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 32

Dari tabel IV. 39, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kebenaran petugas dalam menjalankan tugasnya pengaturan dan pembinaan PKL sebagian besar responden menjawab kurang benar dan tidak benar sebesar (53, 34 %).

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel sikap kerja aparat pelaksana maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

i = Interval kelas

R= Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

k = Jumlah kelas

Dari rumus diatas maka didapat $i = 30-16 = 14$, $14/ 4 = 3, 5$, karean itu dibulatkan keatas maka $i = 4$. Pengelompokan skor tabel untuk variabel sikap kerja aparat pelaksana adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 40
 KLASIFIKASI SKOR VARIABEL
 SIKAP KERJA APARAT PELAKSANA

Kategori Jawaban	Notasi	Kelas Interval
Rendah	R	16-19
Kurang Tinggi	KT	20-23
Cukup Tinggi	CT	24-27
Tinggi	T	28-31

Berdasarkan tabel IV. 40 dapat disusun rekapitulasi variabel sosialisasi, berdasarkan data yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel IV. 41
 REKAPITULASI PENILAIAN
 VARIABEL SIKAP KERJA APARAT PELAKSANA

Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
Rendah (R)	10	16, 67 %
Kurang Tinggi (KT)	26	43, 33 %
Cukup Tinggi (CT)	19	31, 67 %
Tinggi (T)	5	8, 33 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 23-32

Dari tabel rekapitulasi di atas dapat dijelaskan bahwa sikap kerja aparat pelaksana kurang mendukung implementasi kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah hal ini dilihat dari sebagian besar 60 % kategori jawaban kurang tinggi dan rendah. Namun demikian sikap kerja aparat pelaksana juga dalam mendukung implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL masih menunjukkan adanya kondisi yang mendukung implementasi sebesar 40 % yang ditunjukkan dengan kategori jawaban tinggi dan cukup.

B. 4. Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X3)

Kemampuan kerja aparat pelaksana merupakan sebuah kata yang biasanya menunjukkan profesionalisme seseorang untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan. Kemampuan kerja berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental seseorang yaitu menunjuk apa yang dapat dikerjakan bukan apa yang telah dikerjakan. Di bawah ini akan disajikan data (lihat lampiran) dari masing-masing indikator kemampuan kerja aparat pelaksana dari hasil pengisian kuesioner

Tabel IV. 42
TINGKAT KEMAMPUAN PETUGAS
DALAM MENJALIN KERJASAMA DENGAN PEDAGANG

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	2	3,33 %
Baik	22	36,67 %
Kurang baik	30	50 %
Tidak baik	6	10 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 33

Dari tabel IV. 42, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kemampuan petugas dalam menjalin kerjasama dengan pedagang sebagian besar responden menjawab kurang baik dan tidak baik sebesar (60 %).

Tabel IV. 43
TINGKAT KEMAMPUAN PETUGAS DALAM MELAKUKAN
PENDEKATAN PERSONAL TERHADAP PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	5	8,33 %
Baik	25	41,67 %
Kurang baik	22	37,66 %
Tidak baik	8	13,33 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 34

Dari tabel IV. 43, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kemampuan petugas dalam melakukan pendekatan personal terhadap PKL sebagian besar responden menjawab kurang baik dan tidak baik sebesar (51 %).

Tabel IV. 44
TINGKAT KEMAMPUAN PETUGAS
DALAM MENCIPTAKAN KESADARAN PEDAGANG

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	2	3,33 %
Baik	28	46,67 %
Kurang baik	27	45 %
Tidak baik	3	5 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 35

Dari tabel IV. 44, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kemampuan petugas dalam menciptakan kesadaran pedagang sebesar 50 % menjawab baik dan sangat baik serta kurang baik dan tidak baik.

Tabel IV. 45
TINGKAT KEMAMPUAN PETUGAS DALAM MENERIMAN DAN
MENGANALISIS INFORMASI DARI PEDAGANG

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	3	5 %
Baik	25	41, 67 %
Kurang baik	25	41, 67 %
Tidak baik	7	11, 67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 36

Dari tabel IV. 45, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kemampuan petugas dalam menerima dan menganalisis informasi dari pedagang sebagian besar responden menjawab kurang baik dan tidak baik sebesar (53, 34 %).

Tabel IV. 46
TINGKAT KEMAMPUAN PETUGAS DALAM MENENTUKAN
KEBIJAKAN PENATAAN PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	2	3, 33 %
Baik	27	45 %
Kurang baik	27	45 %
Tidak baik	4	6, 67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber: Diolah dari pertanyaan no. 37

Dari tabel IV. 46, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kemampuan petugas dalam menentukan kebijakan penataan PKL sebagian besar responden menjawab kurang baik dan tidak baik sebesar (51, 67 %).

Tabel IV. 47
TINGKAT KEMAMPUAN PETUGAS DALAM MERUMUSKAN
DAN MENENTUKAN SOLUSI TERHADAP
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	2	3,33 %
Baik	23	38,33 %
Kurang baik	25	41,67 %
Tidak baik	10	16,67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 38

Dari tabel IV. 47, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kemampuan petugas dalam merumuskan dan menentukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi PKL sebagian besar responden menjawab kurang baik dan tidak baik sebesar (58,34 %).

Tabel IV. 48
TINGKAT KEMAMPUAN PETUGAS
DALAM MENJALANKAN RENCANA-RENCANA KEBIJAKAN
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	2	3,33 %
Baik	25	41,67 %
Kurang baik	27	45 %
Tidak baik	6	10 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 39

Dari tabel IV. 48, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kemampuan petugas dalam menjalankan rencana-rencana kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebagian besar responden menjawab kurang baik dan tidak baik sebesar (55 %).

Tabel IV. 49
TINGKAT KEMAMPUAN PETUGAS PKL DALAM
MEMBERIKAN PEMAHAMAN PEOSEDUR PELAYANAN
DALAM PROSES PERIJINAN PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	5	8,33 %
Baik	19	31,47 %
Kurang baik	25	41,67 %
Tidak baik	11	18,33%
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 40

Dari tabel IV. 49, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kemampuan petugas dalam memberikan pemahaman prosedur pelayanan proses perijinan PKL sebagian besar responden menjawab kurang baik dan tidak baik sebesar (60 %).

Tabel IV. 50
TINGKAT KEMAMPUAN PETUGAS PKL DALAM
MENERJAKAN PROSES PERIJINAN UNTUK MENJADI PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	4	6,67 %
Baik	25	41,67 %
Kurang baik	25	41,67 %
Tidak baik	6	10 %
Jumlah	60	100 %

Sumber: Diolah dari pertanyaan no. 41

Dari tabel IV. 50, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai sebagian besar responden menjawab kurang baik dan tidak baik sebesar (51,67 %).

Tabel IV. 51
TINGKAT KEMAMPUAN PETUGAS DALAM MEMBERIKAN
PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN PKL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	3	5 %
Baik	22	36,67 %
Kurang baik	27	45 %
Tidak baik	8	13,33 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 42

Dari tabel IV. 51, dapat dijelaskan bahwa dilihat dari jawaban responden mengenai tingkat kemampuan petugas dalam memberikan petunjuk teknis implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebagian besar responden menjawab kurang baik dan tidak baik sebesar (58,33 %).

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel kemampuan kerja aparat pelaksana maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

i = Interval kelas

R = Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

k = Jumlah kelas

Dari rumus diatas maka didapat $i = 32-18=14, 14/ 4 =3, 5$. Untuk itu dibulatkan keatas menjadi 4 maka $i = 4$. Pengelompokan skor tabel untuk variabel Kemampuan aparat adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 52
**KLASIFIKASI SKOR VARIABEL
 KEMAMPUAN KERJA APARAT PELAKSANA**

Kategori Jawaban	Notasi	Kelas Interval
Rendah	R	18-21
Kurang Tinggi	KT	22-25
Cukup Tinggi	CT	26-29
Tinggi	T	30-33

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 33-42

Berdasarkan tabel IV. 52 dapat disusun rekapitulasi variabel kemampuan aparat. Berdasarkan lampiran tersebut maka data yang disajikan sebagai berikut :

Tabel IV. 53
**REKAPITULASI PENILAIAN VARIABEL
 KEMAMPUAN KERJA APARAT PELAKSANA**

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rendah (R)	20	33,33 %
Kurang Tinggi (KT)	22	36,67 %
Cukup Tinggi (CT)	11	18,33 %
Tinggi(T)	7	11,67 %
Jumlah	60	100 %

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 33-42

Dari tabel IV. 46 dapat dijelaskan bahwa dilihat dari rekapitulasi penilaian variabel kemampuan kerja aparat pelaksana bahwa kemampuan kerja aparat pelaksana yang dimiliki kurang mendukung dalam melaksanakan kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Semarang Tengah hal ini bisa dilihat dari kategori jawaban sebagian besar kurang tinggi dan rendah sebesar (70 %). Namun demikian sikap kerja aparat pelaksana juga masih menunjukkan kondisi mendukung implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL yang ditunjukkan dengan kategori jawaban cukup tinggi dan tinggi sebesar (30 %).

C. Analisis Hubungan antara Variabel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat variabel penelitian yaitu Tingkat Sosialisasi (X_1), Sikap aparat (X_2) Kemampuan Aparat (X_3) dan Implementasi Kebijakan (Y). Penulis berhipotesis bahwa ketiga variabel memiliki hubungan yang sangat terikat. Hipotesis yang diajukan penulis adalah :

- 1) Ada hubungan positif dan signifikan antara tingkat sosialisasi (X_1) dengan implementasi kebijakan (Y). Artinya bila Sosialisasi memiliki skor yang positif maka implementasi kebijakannya juga akan bernilai positif, begitu pula sebaliknya.
- 2) Ada hubungan positif dan signifikan antara sikap kerja aparat pelaksana (X_2) dengan implementasi kebijakan (Y). Artinya bila sikap kerja aparat pelaksana memiliki skor yang positif maka implementasi kebijakan juga akan bernilai positif juga, begitu pula sebaliknya.
- 3) Ada hubungan positif dan signifikan antara kemampuan kerja aparat pelaksana (X_3) dengan implementasi kebijakan (Y). Semakin positif kemampuan kerja aparat yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan dalam mendukung kebijakan maka akan semakin positif pula hasil implementasi kebijakan tersebut, begitu pula sebaliknya.
- 4) Ada hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat sosialisasi (X_1), Sikap kerja aparat pelaksana (X_2), kemampuan kerja aparat pelaksana (X_3) dengan implementasi kebijakan (Y). Bila ketiga variabel bebas menunjukkan kondisi positif yang mendukung implementasi kebijakan maka dapat dipastikan implementasi kebijakan akan berhasil, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan data-data yang ada telah disajikan diatas maka berikut ini akan disajikan beberapa tabel silang dengan perhitungan statistik untuk melakukan pengujian hipotesis sebagai analisis kuantitatif.

1. Hubungan antara Tingkat Sosialisasi (X_1) dengan Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL (Y)

Hubungan antara Tingkat Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV. 54 sebagai berikut:

Tabel IV. 54
TABULASI SILANG ANTARA TINGKAT SOSIALISASI (X_1)
DENGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Y)

Implementasi Kebijakan	Tingkat sosialisasi				Jumlah
	T	CT	KT	R	
T	4	2			6
	57,14%	12,5%			10%
CT	2	8	8		18
	28,57%	50%	28,57%		30%
KT	1	5	16	3	25
	14,29%	31,25%	57,54%	33,33%	41,67%
R		1	4	6	11
		6,25%	14,28%	66,67%	18,33
Jumlah	7	16	28	9	60
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan:

T = Tinggi

CT = Cukup Tinggi

KT = Kurang tinggi

R = Rendah

Dari tabel IV. 54 dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang konsisten antara sosialisasi dengan implementasi kebijakan sebanyak 34 responden (56,67 %) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebanyak 4 (57,14 %) responden yang menyatakan tinggi untuk tingkat sosialisasi dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL
2. Sebanyak 8 (50 %) responden yang menyatakan cukup tinggi untuk tingkat Sosialisasi dengan implementasi pengaturan dan pembinaan PKL .
3. Sebanyak 16 (57,54 %) responden yang menyatakan kurang tinggi untuk tingkat sosialisasi dan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL.
4. Sebanyak 6 (66,67 %) responden menyatakan rendah untuk tingkat sosialisasi dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ada kecenderungan hubungan yang positif antara variabel tingkat sosialisasi (X1) dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL. Kondisi ini dapat dilihat dari tabel jumlah terbanyak pada kategori kurang tinggi dalam variabel sosialisasi dan variabel implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Oleh karena itu, dari tabel silang di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel Sosialisasi (X1) dengan implementasi kebijakan (Y) atau dengan kata lain bahwa sosialisasi yang baik

maka implementasi kebijakan akan dapat berhasil dengan baik, atau sebaliknya jika sosialisasi buruk maka akan dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Hubungan antara Sikap Aparat Pelaksana (X_1) dengan Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL (Y) di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Hubungan antara sikap kerja aparat pelaksana dengan Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV. 55, sebagai berikut

Tabel IV.55
TABULASI SILANG ANTARA SIKAP KERJA APARAT PELAKSANA (X_2) DENGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Y)

Implementasi Kebijakan	Sikap kerja aparat pelaksana				Jumlah
	T	CT	KT	R	
T	4	2			6
	40 %	7,6 %			10 %
CT	6	11	1		18
	60 %	42,4%	5,26 %		30 %
KT		13	11	1	25
		50 %	57,89 %	20 %	41,67 %
R			7	4	11
			36,84%	80 %	18,33 %
Jumlah	10	26	19	5	60
	(100 %)	(100 %)	(100 %)	(100 %)	(100 %)

Keterangan

T = Tinggi

CT = Cukup Tinggi

KT = Kurang tinggi

R = Rendah

Dari tabel IV. 55 , dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang konsisten antara sikap aparat dengan implementasi kebijakan sebanyak 30 (50 %) responden sebagai berikut :

1. Sebanyak 4 (40 %) responden yang menyatakan tinggi untuk tingkat sikap kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL
2. Sebanyak 11 (42, 4 %) responden yang menyatakan cukup tinggi untuk sikap kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan Pengaturan dan pembinaan PKL .
3. Sebanyak 11 (57, 89 %) responden yang menyatakan kurang tinggi untuk sikap kerja aparat pelaksana dengan implementasi pengaturan dan pembinaan PKL.
4. Sebanyak 4 (80 %) responden menyatakan rendah untuk sikap kerja aparat pelaksana dan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ada kecenderungan hubungan yang positif antara sikap kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL walaupun terjadi hubungan hanya sekitar 4 (40 %) responden yang menyatakan tinggi untuk tingkat sikap kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL dan 11 (42, 4 %) responden yang menyatakan cukup tinggi untuk sikap kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan Pengaturan dan pembinaan PKL.

Oleh karena itu, dari tabel silang di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel sikap kerja aparat pelaksana (X_2) dengan implementasi kebijakan (Y) atau dengan kata lain bahwa sikap kerja aparat pelaksana mendukung maka akan menimbulkan implementasi kebijakan akan dapat berhasil dengan baik, atau sebaliknya jika sikap kerja aparat pelaksana rendah maka akan dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Hubungan antara Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X_3) dengan Implementasi Kebijakan (Y) Pengaturan dan Pembinaan PKL

Hubungan antara kemampuan kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV. 56, sebagai berikut:

Tabel IV. 56
TABULASI SILANG ANTARA KEMAMPUAN KERJA APARAT PELAKSANA (X_3) DENGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Y)

Implementasi Kebijakan	Kemampuan kerja aparat pelaksana				Jumlah
	T	CT	KT	R	
T	4	2			6
	57,14 %	18,18 %			10 %
CT	3	8	4	3	18
	42,86 %	72,72 %	18,18 %	15 %	30 %
KT		1	16	8	25
		9,09 %	72,72 %	40 %	41,67 %
R			2	9	11
			9,09 %	45 %	18,67 %
Jumlah	7	11	22	20	60
	(100 %)	(100 %)	(100 %)	(100 %)	(100 %)

Keterangan

T = Tinggi

CT = Cukup Tinggi

KT = Kurang tinggi

R = Rendah

Dari tabel IV. 56 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang konsisten antara kemampuan kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan sebesar 37 responden (61, 67 %) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebanyak 4 (57, 14 %) responden yang menyatakan tinggi untuk tingkat kemampuan kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL .
2. Sebanyak 8 (72, 72 %) responden yang menyatakan cukup tinggi untuk tingkat kemampuan kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL .
3. Sebanyak 16 (72, 72 %) responden yang mentakan kategori kurang tinggi untuk tingkat kemampuan kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL.
4. Sebanyak 9 (45%) responden menyatakan rendah untuk tingkat kemampuan kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL .

Berdasarkan tabel IV. 56 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kemampuan kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL walaupun terdapat sekitar 9 (45%) responden menyatakan rendah untuk tingkat kemampuan kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL.

Oleh karena itu, dari tabel silang di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel kemampuan kerja aparat pelaksana (X_3) dengan implementasi kebijakan (Y) atau dengan kata lain bahwa dengan kemampuan kerja aparat pelaksana yang mendukung maka akan menimbulkan implementasi kebijakan yang dapat berhasil dengan baik, atau sebaliknya jika kemampuan kerja aparat pelaksana kurang mendukung maka akan dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Selanjutnya dalam rangka memperkuat adanya hubungan antara variabel tingkat sosialisasi (X1), sikap kerja aparat pelaksana (X2) dan kemampuan kerja aparat pelaksana (X3) dengan implementasi kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL, peneliti kemukakan mengenai indikator-indikator yang menunjukkan kordinatnya paling banyak dalam implementasi kebijakan Pengaturan dan Pembinaan, adalah sebagai berikut:

1. PKL mengalami kesulitan dalam mendapatkan lokasi untuk berjualan dari Pemerintah Kota Semarang, kondisi tersebut ditunjukkan dari sebagian besar responden 63, 33 % menunjukkan jawaban “sulit” dan “sulit sekali”.
2. PKL merasa kurang jelas dalam menerima pesan-pesan sosialisasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL dari aparat, kondisi tersebut ditunjukkan dari sebagian besar responden 61, 67 % menunjukkan jawaban “kurang jelas” dan “tidak jelas” .

3. Pelaksana kebijakan kurang sanggup dalam menyelesaikan pekerjaannya dalam melakukan pengaturan terhadap PKL, kondisi tersebut ditunjukkan dari sebagian besar responden 58,33 % menunjukkan jawaban “kurang sanggup” dan “tidak sanggup”.
4. Petugas PKL tingkat kemampuannya masih kurang memadai dalam memberikan pemahaman prosedur pelayanan dalam proses perijinan untuk menjadi PKL, kondisi tersebut ditunjukkan dari sebagian besar responden 60 % menunjukkan jawaban “kurang baik” dan “tidak baik”.

D. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini ditujukan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan teknik statistik Koefisien Rank Kendall. Penggunaan statistik ini digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana hubungan antara variabel tingkat sosialisasi (X_1) dengan variabel implementasi kebijakan (Y), mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel sikap kerja aparat pelaksana (X_2) dengan implementasi kebijakan dan mengetahui sampai sejauh mana hubungan antara variabel kemampuan kerja aparat pelaksana (X_3) dengan variabel implementasi kebijakan (Y). Dengan kata lain penggunaan teknik Koefisien Korelasi Rank Kendall digunakan penulis untuk menguji hipotesis minor. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y dalam hipotesis minor digunakan rumus Koefisien Determinan (KD).

Selanjutnya penulis juga akan menggunakan teknik Koefisien Konkordasi Kendall untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan diantara keempat variabel secara keseluruhan atau menguji hipotesis mayor yang diajukan dan Koefisien Determinan (KD) untuk mengetahui besarnya pengaruh dari hipotesis mayor yang diajukan.

Berikut ini hasil dari pengajuan hipotesis-hipotesis yang diajukan, adalah sebagai berikut:

1. Koefisien Korelasi Rank Kendall antara Tingkat Sosialisasi (X_1) dengan Implementasi Kebijakan (Y) dan Besarnya Koefisien Determinan (KD)

Dalam analisis ini menggunakan perhitungan bantuan komputer (SPSS). Tabel dalam lampiran memperlihatkan koefisien korelasi antara tingkat sosialisasi (X_1) dengan variabel implementasi kebijakan (Y) sebesar $\tau_{X1} = 0,565$ dengan probabilitas kesalahan (*sig*) sebesar 0,000. Oleh karena *sig* sebesar $0,000 < 0,01$, maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat sosialisasi dengan implementasi kebijakan”. Dengan kata lain, antara sosialisasi dengan implementasi terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Semakin baik sosialisasi yang dilakukan individu, maka akan semakin baik pula implementasi suatu kebijakan.

Secara manual koefisien korelasi Kendall (τ_{X1}) sebesar 0,565 tersebut masih perlu ditransformasikan ke dalam Z-test dengan cara sebagai berikut :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}$$

$$Z = \frac{0,565}{\sqrt{\frac{2(2.60+5)}{9.60(60-1)}}$$

$$Z = \frac{0,565}{\sqrt{\frac{2(120+5)}{540.59}}$$

$$Z = \frac{0,565}{\sqrt{\frac{250}{31860}}$$

$$Z = \frac{0,565}{\sqrt{0,00785}}$$

$$Z = \frac{0,565}{0,0887}$$

$$Z = 6,37$$

Berdasarkan perhitungan ditemukan harga Z hitung sebesar 6,37. Sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z kritik) pada taraf signifikansi 1% (Zt1 %) sebesar 2,66 dan Z-tabel pada 5% (Zt 5 %) sebesar 2,003. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung (6,37) > Zt 5% (2,003) dan Zt 1% (2,66). Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel tingkat sosialisasi dengan implementasi kebijakan” **diterima**.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X_1 terhadap Y dapat dihitung dengan Koefisien Determinan (KD) sebagai berikut :

$$KD = W^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = 0,565^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = 0,319 \cdot 100 \%$$

$$KD = 31,9\%$$

Hasil dari koefisien Determinan di atas menunjukkan bahwa dalam variabel implementasi kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang terjadi perubahan sebesar 31,9% sebagai akibat dari tingkat sosialisasi.

2. Koefisien Korelasi Rank Kendall antara Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X_2) dengan Implementasi Kebijakan dan Besarnya Koefisien Determinan (KD)

Dalam analisis ini menggunakan perhitungan dengan bantuan komputer (SPSS). Tabel dalam lampiran memperlihatkan koefisien korelasi antara variabel kemampuan kerja aparat pelaksana (X_2) dengan variabel implementasi kebijakan (Y) sebesar $\tau_{X_2} = 0,652$ dengan probabilitas kesalahan (*sig*) sebesar 0,000. Oleh karena *sig* sebesar $0,000 < 0,01$, maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara sikap kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan”. Dengan kata lain, antara sikap kerja aparat

pelaksana dengan implementasi kebijakan terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Semakin tinggi sikap kerja aparat pelaksana, maka akan semakin baik pula implementasi kebijakan.

Secara manual Koefisien Korelasi Rank Kendall (τ_{X2}) sebesar 0,652 tersebut masih perlu ditransformasikan ke dalam Z-test dengan cara sebagai berikut :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,652}{\sqrt{\frac{2(2.60+5)}{9.60(60-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,498}{\sqrt{\frac{2(120+5)}{540(59)}}}$$

$$Z = \frac{0,652}{\sqrt{\frac{2(125)}{31860}}}$$

$$Z = \frac{0,652}{\sqrt{\frac{250}{31860}}}$$

$$Z = \frac{0,652}{\sqrt{0,00785}}$$

$$Z = \frac{0,652}{0,0887}$$

$$Z = 7,35$$

Berdasarkan perhitungan ditemukan harga Z hitung sebesar 7,35. sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z kritik) pada taraf signifikansi 1 % (Z_{t1} %) sebesar 2,66 dan Z-tabel pada 5 % (Z_{t5} %) sebesar 2,003. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung ($7,35 > Z_{t5}$ (2,003) dan Z_{t1} (2,66). Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel sikap kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan” **diterima**.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X_2 terhadap Y dapat dihitung dengan Koefisien Determinan (KD), sebagai berikut :

$$KD = W^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = 0,652^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = 0,425 \cdot 100 \%$$

$$KD = 42,5 \%$$

Hasil dari Koefisien Determinan di atas menunjukkan bahwa dalam variabel implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang terjadi perubahan sebesar 42,5 % sebagai akibat dari sikap kerja aparat pelaksana.

3. Koefisien Korelasi Rank Kendall antara Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X_3) dengan Implementasi Kebijakan (Y) dan Besarnya Koefisien Determinan (KD)

Dalam analisis ini menggunakan perhitungan bantuan komputer (SPSS). Tabel dalam lampiran memperlihatkan koefisien korelasi antara kemampuan kerja aparat pelaksana (X_3) dengan variabel implementasi kebijakan (Y) sebesar $\tau_{X3} = 0,665$ dengan probabilitas kesalahan (*sig*) sebesar 0,000. Oleh karena *sig* sebesar $0,000 < 0,01$, maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kemampuan kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan”. Dengan kata lain, antara kemampuan kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan terdapat hubungan yang signifikan dengan arah positif. Semakin baik kemampuan kerja yang dimiliki pelaksana kebijakan, maka akan semakin baik pula implementasi kebijakan.

Secara manual Koefisien Korelasi Kendall (τ_{X3}) sebesar 0,665 tersebut masih perlu ditransformasikan ke dalam Z-test dengan cara sebagai berikut :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,665}{\sqrt{\frac{2(2.60 + 5)}{9.60(60 - 1)}}$$

$$Z = \frac{0,665}{\sqrt{\frac{2(120 + 5)}{540.59}}}$$

$$Z = \frac{0,665}{\sqrt{\frac{250}{31860}}}$$

$$Z = \frac{0,665}{\sqrt{0,00785}}$$

$$Z = \frac{0,665}{0,0887}$$

$$Z = 7,49$$

Berdasarkan perhitungan ditemukan harga Z hitung sebesar 7,49, sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z kritik) pada taraf signifikansi 1 % ($Z_{t1\%}$) sebesar 2,66 dan Z-tabel pada 5 % ($Z_{t5\%}$) sebesar 2,003. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung (7,49) > $Z_{t5\%}$ (2,003) dan $Z_{t1\%}$ (2,66). Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi "terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kemampuan kerja pelaksana dengan implementasi kebijakan" diterima.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X_3 terhadap Y dapat dihitung dengan Koefisien Determinan (KD) sebagai berikut :

$$KD = W^2 \cdot 100\%$$

$$KD = 0,665^2 \cdot 100\%$$

$$KD = 0,442 \cdot 100\%$$

$$KD = 44,2\%$$

Hasil dari Koefisien Determinan di atas menunjukkan bahwa dalam variabel implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah kota Semarang terjadi perubahan sebesar 44,2 % sebagai akibat dari pengaruh kemampuan kerja aparat pelaksana.

4. Koefisien Konkordasi Kendall antara Tingkat Sosialisasi (X_1), Sikap Kerja Aparat Pelaksana (X_2), dan Kemampuan Kerja Aparat Pelaksana (X_3) dengan Implementasi Kebijakan (Y) dan Besarnya Koefisien Determinan (KD)

Analisis ini digunakan untuk menguji signifikansi antara 3 variabel independen yaitu tingkat sosialisasi, sikap kerja aparat pelaksana, dan kemampuan kerja aparat pelaksana yang diajukan oleh penulis dengan variabel dependennya yaitu implementasi kebijakan. Koefisien Konkordasi Kendall diketahui dengan bantuan komputer (SPSS) pada lampiran menghasilkan $W = 0,579$

Untuk menguji signifikansi Koefisien Konkordasi Kendall (W) maka harga W tersebut dimasukkan ke rumus Chi Kuadrat sehingga diperoleh hasil harga chi kuadrat sebesar 104,18 dengan probabilitas kesalahan (signifikansi) sebesar 0,000. Dengan $df = K-1 = 3$ menunjukkan probabilitas sebesar 0,00 dan nilai ini lebih kecil dari $\alpha = 0,01$

sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima dengan kata lain menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat sosialisasi, sikap kerja aparat pelaksana dan kemampuan kerja aparat pelaksana dengan variabel implementasi kebijakan.

Angka yang diperoleh di atas selanjutnya dikonsultasikan dengan harga kritis Chi Kuadrat dengan derajat bebas (db) = $N-1 = 60$ pada taraf signifikansi 1 % dan 5 %. Harga kritis tabel antara $N = 60$ taraf signifikansi (1 %) menunjukkan angka 88, 379, sedangkan pada taraf signifikansi 5 % menunjukkan angka 83, 298. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut diketahui bahwa X^2 hasil penghitungan $> X^2$ pada taraf signifikansi 1 % dan 5 %, yaitu :

$$104, 18 > 88, 379$$

$$104, 18 > 83, 298$$

Berdasarkan analisis data yang menunjukkan X^2 tabel membuktikan bahwa antara tingkat sosialisasi (X_1), sikap kerja aparat pelaksana (X_2), dan kemampuan kerja aparat pelaksana (X_3) mempunyai hubungan yang signifikan dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Dengan demikian hipotesis mayor yang diajukan oleh penulis dapat diterima.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y dapat dihitung dengan Koefisien Determinasi (KD) sebagai berikut :

$$KD = W^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = 0,579^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = 0,3352 \cdot 100 \%$$

$$KD = 33,52 \%$$

Hasil dari Koefisien Determinan di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi, sikap kerja aparat pelaksana, dan kemampuan kerja aparat pelaksana sebesar 33,52%.

Sebagai kelengkapan studi penelitian, maka dapat diperoleh pula harga koefisien non determinasi, yaitu sebesar $100\% - 33,52\% = 66,48\%$. Hal ini menunjukkan sebesar 66,48% persen variasi yang terjadi pada implementasi disebabkan oleh pengaruh variabel bebas lain di luar variabel tingkat sosialisasi (X_1), sikap kerja aparat pelaksana (X_2), dan kemampuan kerja aparat pelaksana (X_3).

E. Diskusi

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh tingkat sosialisasi (X1) terhadap implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan tersebut dan kemudian berdasarkan penyebaran kuesioner lapangan yang selanjutnya dibuat penghitungan yang sifatnya kuantitatif maka dilakukan perbandingan antara hipotesis penelitian yang diajukan dengan dengan hasil penghitungan tersebut.

Hasil perhitungan ditemukan harga Z hitung sebesar 6,37. Sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z kritis) pada taraf signifikansi 1% ($Z_{t1\%}$) sebesar 2,66 dan Z-tabel pada 5% ($Z_{t5\%}$) sebesar 2,003. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung ($6,37 > Z_{t5\%} (2,003)$ dan $Z_{t1\%} (2,66)$). Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi “terdapat hubungan positif antara variabel tingkat sosialisasi dengan implementasi kebijakan” diterima. Kemudian besarnya pengaruh sebesar 31,9%.

2. Terdapat pengaruh antara sikap kerja aparat pelaksana (X2) terhadap implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan tersebut dan kemudian berdasarkan penyebaran kuesioner lapangan yang selanjutnya dibuat penghitungan yang sifatnya kuantitatif maka dilakukan perbandingan antara

hipotesis penelitian yang diajukan dengan dengan hasil penghitungan tersebut.

Hasil perhitungan ditemukan harga Z hitung sebesar 7,35, sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z kritik) pada taraf signifikansi 1 % (Z_{t1} %) sebesar 2,66 dan Z-tabel pada 5 % (Z_{t5} %) sebesar 2,003. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung ($7,35 > Z_{t5}$ % (2,003) dan Z_{t1} (2,66)). Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi “terdapat hubungan positif antara variabel sikapkerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan” diterima. Kemudian besarnya pengaruh sebesar 42,5 %

3. Terdapat pengaruh antara kemampuan aparat pelaksana (X3) terhadap Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan tersebut dan kemudian berdasarkan penyebaran kuesioner dilapangan yang selanjutnya dibuat penghitungan yang sifatnya kuantitatif maka dilakukan perbandingan antara hipotesis penelitian yang diajukan dengan dengan hasil penghitungan tersebut.

Hasil perhitungan ditemukan harga Z hitung sebesar 7,49, sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z kritik) pada taraf signifikansi 1 % (Z_{t1} %) sebesar 2,66 dan Z-tabel pada 5 % (Z_{t5} %) sebesar 2,003. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung ($7,49 > Z_{t5}$ % (2,003) dan Z_{t1} % (2,66)). Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel kemampuan dengan

implementasi program” diterima. Kemudian besarnya pengaruh sebesar 44,2 %.

4. Terdapat Pengaruh tingkat sosialisasi (X1), sikap kerja aparat pelaksana (X2) dan kemampuan kerja aparat pelaksana (X3) terhadap implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan tersebut dan kemudian berdasarkan penyebaran kuesioner dilapangan yang selanjutnya dibuat penghitungan yang sifatnya kuantitatif maka dilakukan perbandingan antara hipotesis penelitian yang diajukan dengan dengan hasil penghitungan tersebut.

Koefisien konkordasi Kendall diketahui dengan bantuan komputer (SPSS) pada lampiran menghasilkan $W = 0,579$. Pengujian untuk menguji signifikansi Koefisiensi Konkordasi Kendall (W) maka harga W tersebut dimasukkan ke rumus Chi Kuadrat sehingga diperoleh hasil harga chi kuadrat sebesar 104,18 dengan probabilitas kesalahan (signifikansi) sebesar 0,000. Dengan $df = K-1 = 3$ menunjukkan probabilitas sebesar 0,00 dan nilai ini lebih kecil dari $\alpha = 0,01$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima dengan kata lain menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat sosialisasi, sikap kerja aparat pelaksana dan kemampuan kerja aparat pelaksana dengan variabel implementasi kebijakan”.

Angka yang diperoleh di atas selanjutnya dikonsultasikan dengan harga kritis Chi Kuadrat dengan derajat bebas (db) = N-1 = 60 pada taraf signifikansi 1 % dan 5 %. Harga kritis tabel antara N = 60 taraf signifikansi (1 %) menunjukkan angka 88, 379, sedangkan pada taraf signifikansi 5 % menunjukkan angka 83, 298. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut diketahui bahwa X^2 hasil penghitungan > X^2 pada taraf signifikansi 1 % dan 5 %, yaitu :

$$104, 18 > 88, 379$$

$$104, 18 > 83, 298$$

Berdasarkan analisis data yang menunjukkan X^2 tabel membuktikan bahwa antara tingkat sosialisasi (X_1), sikap kerja aparat pelaksana (X_2), dan kemampuan kerja aparat pelaksana (X_3) mempunyai hubungan yang signifikan dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Dengan demikian hipotesis mayor yang diajukan oleh penulis dapat dibuktikan. Kemudian besarnya pengaruh sebesar 33, 52 %.

5. Indikator-indikator yang menunjukkan kordinatnya paling banyak dalam implementasi kebijakan Pengaturan dan Pembinaan, adalah sebagai berikut:
 - a. PKL mengalami kesulitan dalam mendapatkan lokasi untuk berjualan dari Pemerintah Kota Semarang, kondisi tersebut ditunjukkan dari sebagian besar responden 63, 33 % menunjukan jawaban “sulit” dan “sulit sekali”.
 - b. PKL merasa kurang jelas dalam menerima pesan-pesan sosialisasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL dari aparat, kondisi tersebut

ditunjukkan dari sebagian besar responden 61, 67 % menunjukkan jawaban “kurang jelas” dan “tidak jelas” .

- c. Pelaksana kebijakan kurang sanggup dalam menyelesaikan pekerjaannya dalam melakukan pengaturan terhadap PKL, kondisi tersebut ditunjukkan dari sebagian besar responden 58, 33 % menunjukkan jawaban “kurang sanggup” dan “tidak sanggup”.
- d. Petugas PKL tingkat kemampuannya masih kurang memadai dalam memberikan pemahaman prosedur pelayanan dalam proses perijinan untuk menjadi PKL, kondisi tersebut ditunjukkan dari sebagian besar responden 60 % menunjukkan jawaban “kurang baik” dan “tidak baik”.

Berdasarkan hal di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa antara analisis teoritis yang dilakukan penulis dalam mengkaji implementasi Perda No. 11 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah yang menggunakan teori-teori implementasi dari George Edwards III, Rina Martini, dkk, dan Van Meter dan Van Horn menunjukkan adanya kesesuaian dengan hasil penelitian yang telah disajikan dalam pokok-pokok bahasan di atas.

Kondisi adanya kesesuaian tersebut terlihat dari hasil pengujian hipotesis-hipotesis yang diajukan baik hipotesis minor maupun hipotesis mayornya dan indikator-indikator dari variabel-variabel penelitian yang menunjukkan koordinatnya paling banyak. Kemudian bahwa jika variabel-variabel yang menyebabkan kurang maksimalnya implementasi kebijakan tersebut di atas tidak segera untuk diberikan solusi pemecahan masalahnya maka implikasi yang muncul adalah kemungkinan semakin terhambatnya kebijakan akan semakin terbuka sehingga keberhasilan

implementasi kebijakan tersebut akan sulit sekali terwujud, disamping itu indikator-indikator dari variabel-variabel penelitian yang koordinatnya menunjukkan adanya kondisi-kondisi masih kurang baik maka juga perlu untuk segera diperbaiki dalam rangka memperbaiki kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, usaha dalam rangka memperbaiki implementasi Perda No. 11 Tahun 2000 Tentang pengaturan dan Pembinaan PKL adalah memperbaiki indikator-indikator dari tiap variabel penelitian yang diambil dan memperbaiki variabel-variabel penelitian secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

Setelah dilakukan pembahasan secara bertahap pada bab-bab terdahulu terutama dalam membuktikan ada tidaknya hubungan yang terjadi antara tingkat sosialisasi, sikap kerja aparat pelaksana, dan kemampuan kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, maka berdasarkan data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan seperti diuraikan berikut ini:

A. Simpulan

- A.1. Identitas responden terbagi dalam beberapa macam. *Pertama*, responden menurut umur mayoritas responden berusia 31-40 tahun sebanyak 20 responden (33,33 %) dan yang terkecil berusia 61 tahun keatas sebanyak 3 orang (5%). *Kedua*, responden menurut jenis kelamin sebagian besar berjenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 45 orang (75 %) dan lainnya berjenis kelamin adalah wanita sebanyak 15 orang (25 %). *Ketiga*, responden menurut jenis dagangan sebagian besar responden berjualan makanan sebanyak 25 responden (41,67 %) dan yang terkecil penjual gorengan sebanyak 6 responden (10%).
- A.2. Beberapa kategorisasi masing-masing variabel dalam penelitian baik variabel implementasi (Y) maupun variabel tingkat sosialisasi (X1), sikap kerja aparat pelaksana (X2), serta kemampuan kerja aparat

pelaksana (X3) yang mempunyai hubungan dengan implementasi kebijakan (Y) adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah masih belum berhasil, hal ini ditunjukkan dari skor rekapitulasi penilaian variabel tersebut sebagian besar kurang tinggi dan rendah sebesar 60 %. Kelanjutnya keberhasilan hanya sebesar 40 % terlihat dari kategori jawaban cukup tinggi dan tinggi.

Beberapa indikator yang menunjukkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan (Y) adalah: *pertama*, tingkat pelayanan kebijakan nilai ukurnya meliputi a) tingkat kemudahan dalam pengurusan ijin usaha berdagang bagi PKL sebesar 60 % ditunjukkan dengan jawaban “sulit” sebesar 50 % dan “sulit sekali” sebesar 10 %, b) kemudahan PKL dalam mendapatkan lokasi berdagang dari Pemerintah Kota Semarang sebesar 63, 33 % ditunjukkan dengan jawaban “sulit” sebesar 58, 33 % dan “sulit sekali” sebesar 5 %, c) proses pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 60 % ditunjukkan dengan jawaban “kurang baik” sebesar 50 % dan “tidak baik” sebesar 10 %, dan d) kepuasan terhadap pelayanan dalam pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 56, 67 % ditunjukkan dengan jawaban “kurang puas” sebesar 41, 67 % dan “tidak puas” sebesar 15 %. *Kedua*, tingkat perubahan perilaku pedagang nilai ukurnya meliputi a) tingkat kepatuhan pedagang

terhadap kebijakan bongkar-pasang tempat dagangan PKL sebesar 61, 67 % ditunjukkan dengan jawaban “kurang mematuhi” sebesar 55 % dan “tidak mematuhi” sebesar 6, 67 %, b) tingkat kepatuhan dalam berdagang ditempat yang ditentukan sebesar 56, 67 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang mematuhi” sebesar 48, 33 % dan “tidak mematuhi” sebesar 8, 33%, c) tingkat kedisiplinan PKL dalam membayar retribusi sebesar 54, 67 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang disiplin” sebesar 50 % dan “tidak disiplin” sebesar 6, 67 %, dan d) tingkat kepatuhan PKL dalam membangun tempat berdagang tidak semi permanen sebesar 55 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang mematuhi” sebesar 45 % dan “tidak mematuhi” sebesar 10 %, serta e) tingkat kepatuhan PKL untuk tidak menempati lokasi berdagang sebagai tempat tinggal sebesar 56, 67 %, ditunjukkan dengan jawaban “sulit” sebesar 45 % dan “sulit sekali” sebesar 11, 67 %.. *Ketiga*, hasil kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL nilai ukurnya meliputi a) tingkat kemanfaatan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 56, 67 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang bermanfaat” sebesar 43, 33 % dan “tidak bermanfaat” sebesar 13, 33 %, b) tingkat peningkatan kesadaran PKL tentang arti pentingnya kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 58, 34 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang meningkatkan” sebesar 46, 67 % dan “tidak meningkatkan” sebesar 11, 67 %, dan c) tingkat berkurangnya

kesulitan PKL dalam mendapatkan lahan dengan adanya kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 56, 67 % ditunjukkan dengan jawaban “kurang mengurangi “ sebesar 45 % dan “tidak mengurangi” sebesar 11, 67 %.

2. Tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh petugas dalam implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah kurang mendukung, hal ini ditunjukkan dengan hasil skor rekapitalasi penilaian “kurang tinggi” dan “rendah” sebesar 61, 67 %. Kelanjutnya tingkat sosialisasi mendukung implementasi kebijakan hanya sebesar 38, 33 % dari kategori jawaban “cukup tinggi” dan “tinggi “.

Beberapa indikator yang dianggap menunjukkan kondisi kurang mendukungnya tingkat sosialisasi (X1) dalam implementasi kebijakan (Y) adalah *pertama*, kejelasan nilai ukurnya meliputi a) tingkat kejelasan dalam mensosialisasikan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 51, 67 %) ditunjukkan dengan jawaban “kurang jelas” dan “tidak jelas”, b) , tingkat penggunaan bahasa yang mudah dipahami dalam sosialisasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 56, 67 % ditunjukkan dengan jawaban “kurang mudah” dan “tidak mudah dipahami”, c) tingkat rincinya informasi yang disampaikan petugas PKL dalam sosialisasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 56, 67 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang rinci” dan “tidak rinci” dan,

d) tingkat penerimaan secara jelas PKL terhadap pesan sosialisasi yang disampaikan petugas PKL sebesar 61, 67 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang jelas” dan “tidak jelas”. *Kedua*, kecukupan nilai ukurnya meliputi a) tingkat PKL mendapatkan informasi yang lengkap dalam sosialisasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 61, 66 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang lengkap” dan “tidak lengkap, b) tingkat kelayakan media yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 55 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang layak” dan “tidak mematuhi”, dan c) tingkat memudahinya pemahaman PKL terhadap kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL menunjukkan posisi yang seimbang sebesar 50 %) ,ditunjukkan dengan jawaban “kurang memadai” dan “tidak memadai” serta “sangat memadai dan memadai”. *Ketiga*, ketepatan nilai ukurnya meliputi a) tingkat ketepatan situasi dalam sosialisasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 55 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang tepat” dan “tidak tepat” , b) tingkat kesesuaian materi pesan kebijakan dengnn rencana-rencana kebijakan dalam sosialisasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 55 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang sesuai” dan “tidak sesuai” dan, c) tingkat PKL secara tepat menafsirkan pesan sosialiasai kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 60 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang bisa” dan “tidak bisa” .

3. Sikap kerja aparat pelaksana dalam implementasi kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah kurang mendukung, ditunjukkan dengan sebagian besar 60 % “kurang tinggi” dan “rendah” ,namun demikian sikap kerja aparat pelaksana juga dalam implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL masih menunjukkan adanya kondisi yang mendukung, ditunjukkan dengan kategori jawaban sebesar 40 % “mendukung” dan “cukup mendukung”.

Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi kurang mendukungnya variabel sikap kerja aparat pelaksana (X2) terhadap implementasi kebijakan (Y) adalah *pertama*, kesetiaan nilai ukurnya meliputi a) petugas PKL dalam menarik retribusi sesuai dengan waktu dan biaya yang berlaku dalam peraturan kebijakan sebesar 56, 67 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang sesuai dan “tidak sesuai” , b) tingkat pengabdian petugas pada pekerjaannya dalam pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 56, 67 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang baik dipahami” dan “tidak mudah dipahami” dan, c) petugas PKL tidak mempengaruhi PKL untuk menentang kebijakan sebesar 68, 33 %, ditunjukkan dengan jawaban “mempengaruhi” dan “sangat mempengaruhi”. *Kedua*, tanggungjawab nilai ukurnya meliputi a) tingkat kesanggupan PKL dalam menyelesaikan pekerjaannya mengatur dan membina PKL sebesar 58, 33 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang sanggup”

dan “tidak sanggup” dan, b) tingkat kesanggupan petugas PKL dalam menarik retribusi dengan sebaik-baiknya sebesar 55 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang sanggup” dan “tidak sanggup”. *Ketiga*, ketaatan nilai ukurnya meliputi a) tingkat ketaatan petugas terhadap perda pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 56, 66 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang taat” dan “tidak taat” dan, b) tingkat kesopanan petugas dalam menarik retribusi pada PKL sebesar 51, 67 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang sopan” dan “tidak sopan”. *Keempat*, kejujuran nilai ukurnya meliputi a) tingkat kejujuran petugas dalam memberikan besarnya tarif retribusi sebesar 60 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang jujur” dan “tidak jujur”, b) tingkat kejujuran PKL dalam memberikan informasi secara benar mengenai kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 58, 33 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang benar” dan “tidak benar, dan, c) tingkat kebenaran petugas dalam menjalankan tugasnya melakukan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 53, 34 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang benar” dan “tidak benar”.

4. Kemampuan kerja aparat pelaksana yang dimiliki kurang mendukung dalam melaksanakan kebijakan Pengaturan dan Pembinaan PKL di Semarang Tengah, hal ini bisa dilihat dari sebagian besar 70 % nilai kategori jawaban “kurang tinggi” dan “rendah”. Kelanjutnya kemampuan kerja aparat pelaksana juga

masih menunjukkan kondisi mendukung implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 30 %, ditunjukkan dengan kategori jawaban “cukup tinggi” dan “tinggi” .

Beberapa indikator yang dianggap menunjukkan kondisi kurang mendukungnya sikap aparat pelaksana (X3) terhadap implementasi kebijakan (Y) adalah *pertama*, kemampuan berinteraksi nilai ukurnya meliputi a) tingkat kemampuan petugas PKL dalam menjalin kerjasama dengan PKL sebesar 60 %, ditunjukkan dengan kategori jawaban “kurang baik” dan “tidak baik”, b) tingkat kemampuan dalam melakukan pendekatan personal dengan PKL pada saat terjadi konflik menunjukkan kategori jawaban sebesar 50 %, ditunjukkan dengan kategori jawaban “kurang baik” dan “tidak baik” serta “baik” dan “sangat baik” dan, c) tingkat petugas PKL dalam menciptakan kesadaran pada PKL mengertai arti pentingnya kebijakan menunjukkan kondisi yang seimbang sebesar 50 %, ditunjukkan dengan kategori jawaban “kurang baik” dan “tidak baik” serta “baik” dan “sangat baik”. *Kedua*, kemampuan konseptual nilai ukurnya meliputi a) tingkat kemampuan petugas dalam menerima dan menganalisis informasi dari PKL sebesar 53,34 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang baik” dan “tidak baik” b) tingkat kemampuan dalam menentukan kebijakan penataan PKL sebesar 51,67 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang baik” dan “tidak baik” dan, c) tingkat

kemampuan petugas dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi PKL sebesar 59,34 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang baik” dan “tidak baik”. *Ketiga*, indikator kemampuan administratif nilai ukurnya meliputi a) tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 55 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang baik” dan “tidak baik” dan, b) tingkat kemampuan petugas dalam memberikan pemahaman prosedur pelayanan dalam perijinan untuk PKL sebesar 60 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang baik” dan “tidak baik”. *Keempat*, kemampuan teknis nilai ukurnya meliputi a) tingkat kemampuan petugas dalam mengerjakan proses perijinan PKL sebesar 51,67 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang baik” dan “tidak baik”, dan b) tingkat kemampuan petugas dalam melaksanakan petunjuk teknis kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL sebesar 58,33 %, ditunjukkan dengan jawaban “kurang baik” dan “tidak baik”.

- A. 3. Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan kordinatnya paling buruk dalam implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL, yaitu antara lain:
1. PKL mengalami kesulitan dalam mendapatkan lokasi untuk berjualan dari Pemerintah Kota Semarang, kondisi tersebut ditunjukkan dari sebagian besar responden 63,33 % menunjukkan jawaban “sulit” dan “sulit sekali”.

2. PKL merasa kurang jelas dalam menerima pesan-pesan sosialisasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL dari aparat, kondisi tersebut ditunjukkan dari sebagian besar responden 61, 67 % menunjukkan jawaban “kurang jelas” dan “tidak jelas”.
3. Pelaksana kebijakan kurang sanggup dalam menyelesaikan pekerjaanya dalam melakukan pengaturan terhadap PKL, kondisi tersebut ditunjukkan dari sebagian besar responden 58, 33 % menunjukkan jawaban “kurang sanggup” dan “tidak sanggup”.
4. Petugas PKL tingkat kemampuannya masih kurang memadai dalam memberikan pemahaman prosedur pelayanan dalam proses perijinan untuk menjadi PKL, kondisi tersebut ditunjukkan dari sebagian besar responden 60 % menunjukkan jawaban “kurang baik” dan “tidak baik”.

A.3. Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis.

A.3.1. Pengujian Hipotesis variabel Y dengan masing-masing variabel X

Berikut ini hasil pengujian hipotesis variabel Y dengan masing-masing variabel X, dapat dilihat dibawah ini:

1. Berdasarkan perhitungan ditemukan harga Z hitung sebesar 6,37. sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z kritik) pada taraf signifikansi 1% (Z_{t1} %) sebesar 2,66 dan Z-tabel pada 5 % (Z_{t5} %) sebesar 2,03. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung ($6,37 > Z_{t5}$ (2,003) dan Z_{t1} (2,66)). Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat sosialisasi dengan implementasi kebijakan” diterima. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X_1 terhadap Y dapat dihitung dengan Koefisien Determinan (KD) menunjukkan bahwa dalam variabel implementasi program Pengaturan Dan Pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang terjadi perubahan sebesar 31,9% sebagai akibat dari variabel tingkat sosialisasi.
2. Berdasarkan perhitungan ditemukan harga Z hitung sebesar 7,35. sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z

kritik) pada taraf signifikansi 1 % (Z_{t1} %) sebesar 2,66 dan Z-tabel pada 5 % (Z_{t5} %) sebesar 2,003. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung (7,35) > Z_{t5} % (2,003) dan Z_{t1} (2,66). Maka hipotesis penelitian yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel sikap kerja aparat pelaksana dengan implementasi kebijakan” diterima. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X_2 terhadap Y dapat dihitung dengan Koefisien Determinan (KD) hasilnya adalah sebesar 42, % sebagai akibat dari variabel sikap kerja aparat pelaksana.

3. Berdasarkan perhitungan ditemukan harga Z hitung sebesar 7,49, sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z kritik) pada taraf signifikansi 1 % (Z_{t1} %) sebesar 2,66 dan Z-tabel pada 5 % (Z_{t5} %) sebesar 2,003. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung (7,49) > Z_{t5} % (2,003) dan Z_{t1} % (2,66). Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemampuan dengan implementasi program” diterima. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X_3 terhadap Y dapat dihitung dengan Koefisien Determinan (KD)

adalah sebesar 44, 2 % sebagai akibat dari pengaruh variabel kemampuan kerja aparat pelaksana.

A.3.2. Pengujian Hipotesis Variabel X₁, X₂, dan X₃ dengan Variabel Y

Berdasarkan penghitungan Koefisien konkordasi diketahui dengan bantuan komputer (SPSS) pada lampiran menghasilkan $W = 0,579$. Harga W tersebut setelah dimasukkan ke rumus Chi Kuadrat sehingga diperoleh hasil harga chi kuadrat sebesar 104, 18. Selanjutnya setelah hasil Chi Kuadrat tersebut dikonsultasikan dengan taraf signifikansi (1 %) lebih besar dari angka 88, 379, sedangkan pada taraf signifikansi 5 % lebih besar dari angka 83, 298. Maka diketahui bahwa hipotesis terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat sosialisasi (X₁), sikap kerja aparat pelaksana (X₂), dan kemampuan kerja aparat pelaksana (X₃) dengan implementasi kebijakan (Y) dapat diterima.

Selanjutnya pengaruh variabel X₁, X₂ dan X₃ terhadap Y setelah dihitung dengan Koefisien Determinan (KD) hasilnya 33, 52 %, sedangkan variasi yang terjadi pada implementasi kebijakan disebabkan oleh pengaruh variabel bebas lain di luar variabel tingkat sosialisasi (X₁), sikap kerja aparat pelaksana (X₂), dan kemampuan kerja aparat pelaksana (X₃) adalah sebesar 66, 48 %.

- A. 4. Kesimpulan terhadap indikator-indikator dari masing-masing variabel-variabel penelitian yang kordinatnya paling banyak
- a. PKL mengalami kesulitan dalam mendapatkan lokasi untuk berjualan dari Pemerintah Kota Semarang.
 - b. PKL merasa kurang jelas dalam menerima pesan-pesan sosialisasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL dari aparat.
 - c. Pelaksana kebijakan kurang sanggup dalam menyelesaikan pekerjaanya dalam melakukan pengaturan terhadap PKL.
 - d. Petugas PKL tingkat kemampuannya masih kurang memadai dalam memberikan pemahaman prosedur pelayanan dalam proses perijinan untuk menjadi PKL.

B. Saran

Berikut ini saran-saran yang dapat diberikan dalam rangka memperbaiki implementasi Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada khususnya dan Kota Semarang pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Pedagang Kaki Lima (UPPKL) Dinas Pasar Kota Semarang sebagai pihak yang melaksanakan koordinasi Pengaturan dan Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya di Kecamatan Semarang Tengah untuk mengatasi kesulitan PKL dalam mendapatkan lahan untuk berjualan, melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan inventarisir kembali tempat-tempat yang secara legal bisa dijadikan lokasi untuk berjualan dan juga inventarisir terhadap PKL-PKL dalam satu wilayah kerja (satu kecamatan).
 - b. Menempatkan PKL-PKL pada lokasi-lokasi yang secara legal menjadi tempat untuk berjualan.
 - c. PKL-PKL yang belum mempunyai lokasi untuk berjualan, UPPKL mencari lokasi-lokasi yang bisa dijadikan tempat untuk berjualan dengan kriteria-kriteria yaitu lokasi-lokasi tersebut bisa memberikan *space* bagi publik yang akan menggunakannya, kondisinya tidak terlalu mengganggu ketertiban umum dan lokasinya berpeluang mendatangkan pembeli.
 - d. UPPKL menjadi fasilitator dalam pembangunan pusat PKL seperti yang terjadi di Parkiran Universitas Diponegoro, yaitu mengumpulkan

E. Diskusi

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh tingkat sosialisasi (X1) terhadap implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan tersebut dan kemudian berdasarkan penyebaran kuesioner lapangan yang selanjutnya dibuat penghitungan yang sifatnya kuantitatif maka dilakukan perbandingan antara hipotesis penelitian yang diajukan dengan dengan hasil penghitungan tersebut.

Hasil perhitungan ditemukan harga Z hitung sebesar 6,37. sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z kritis) pada taraf signifikansi 1% ($Z_{t1\%}$) sebesar 2,66 dan Z-tabel pada 5% ($Z_{t5\%}$) sebesar 2,003. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung ($6,37 > Z_{t5\%}$ ($2,003$) dan $Z_{t1\%}$ ($2,66$)). Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi “terdapat hubungan positif antara variabel tingkat sosialisasi dengan implementasi kebijakan” diterima. Kemudian besarnya pengaruh sebesar 31,9%.

2. Terdapat pengaruh antara sikap kerja aparat pelaksana (X2) terhadap implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan tersebut dan kemudian berdasarkan penyebaran kuesioner lapangan yang selanjutnya dibuat penghitungan yang sifatnya kuantitatif maka dilakukan perbandingan antara

beberapa pedagang PKL dalam satu lokasi dengan bekerjasama dengan pihak perbankan yang pembayarannya dengan angsuran.

Dengan adanya tindakan seperti itu diharapkan PKL yang mengalami kesulitan lokasi untuk berjualan dapat tereduksi kedalam langkah-langkah yang dilakukan di atas sehingga akan tercipta kondisi semakin berkurangnya kesulitan PKL dalam mendapatkan lahan.

2. Untuk mengatasi persoalan kurang jelasnya PKL terhadap pesan-pesan sosialisasi kebijakan maka setiap PKL terlebih dahulu perlu diberikan buku Perda yang mengatur tentang pengaturan dan pembinaan PKL dimana peraturan tersebut materinya bersifat komprehensif dan detail yang berisi, adalah:
 - a. Jenis-jenis dan besarnya pungutan retribusi PKL.
 - b. Prosedur, persyaratan yang harus dipenuhi dalam perijinan PKL.
 - c. Lokasi-lokasi yang disediakan untuk dapat dijadikan tempat berjualan bagi PKL serta larangan-larangan lokasi-lokasi mana yang tidak boleh untuk berjualan bagi PKL.
 - d. Hak-hak yang didapatkan oleh PKL dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PKL. Hak PKL berisi bentuk pelayanan apa saja yang diberikan Pemerintah Kota Semarang pada PKL dan kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh para PKL.
 - e. Bentuk-bentuk pelanggaran dan bentuk-bentuk serta kategori-kategori sanksi bagi PKL yang melanggar.

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemberian masing-masing satu buah buku Perda tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL tersebut diharapkan PKL mengerti dan memahami terlebih dahulu peraturan tersebut. Setelah langkah ini dilakukan maka selanjutnya dalam usaha memperjelas pesan-pesan sosialisasi, UPPKL menggunakan media komunikasi yang dianggap efektif dalam mentransfer pesan kebijakan yang berupa buletin bulanan dengan skala mini atau seharga maksimal Rp. 1.000,00 yang berisi penjelasan dari point-point penting dalam buku Perda PKL dan info-info terkini tentang kePKL-an, sehingga dengan adanya langkah ini diharapkan dapat membantu memperjelas pesan-pesan dari sosialisasi kebijakan masalah PKL kepada para PKL tersebut.

3. Dalam mengatasi persoalan kurang sanggupnya petugas PKL melaksanakan pengaturan PKL maka bentuk solusinya adalah UPPKL melakukan pendekatan secara personal dengan mencari latar belakang terjadinya masalah tersebut, melakukan analisis atas masalah dari hasil pendekatan personal dan selanjutnya mencari solusi yang dianggap tepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Jika penyebab masalah tersebut karena kesejahteraan yang kurang maka UPPKL diharapkan meningkatkan gaji dari para petugas PKL dan jika masalah tersebut karena faktor maka solusinya adalah dengan memberikan sanksi yang dianggap relevan atas terjadinya faktor tersebut.
4. Petugas pelayanan perijinan PKL perlu ditingkatkan pemahamannya mengenai prosedur pelayanan perijinan dan kemampuannya dalam memberikan penjelasan terhadap prosedur perijinan kepada para PKL yang melakukan

perijinan melalui pelatihan (seperti saran nomor 8) dan untuk membantu mengertinya PKL terhadap prosedur perijinan maka tempat PKL melakukan perijinan diberikan papan informasi tentang prosedur perijinan (seperti saran pada nomor 6).

5. Di perlukan sosialisasi Perda yang intensif secara personal dilakukan oleh petugas dengan tujuan PKL yang diberi satu buah buku Perda tentang PKL tersebut dapat melakukan dialog dengan petugas minimal dua kali dalam seminggu menyangkut sosialisasi dalam hal tujuan dan manfaat perijinan, besarnya tarif, hak dan kewajiban PKL, serta sanksi bagi PKL yang melanggar dengan kategori sanksi ringan, menengah dan berat. Bentuk sosialisasi tersebut baik secara langsung oleh petugas PKL maupun secara tidak langsung melalui media komunikasi seperti famplet maupun brosur-brosur. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan PKL akan semakin mengerti dan paham tentang Perda Pengaturan dan Pembinaan PKL sehingga mereka akan berperilaku kearah pada mendukungnya implementasi dari Perda itu sendiri.
6. Di kantor tempat PKL melakukan perijinan agar dicantumkan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PKL untuk bisa menjadi PKL dalam papan informasi ditempat perijinan tersebut terjadi. Dalam papan pengumuman tersebut dicantumkan:
 - a. Alur tentang pengurusan ijin menjadi PKL
 - b. Persyaratan administratif
 - c. Besarnya biaya

- d. Lama pengurusan ijin
 - e. Hak dan kewajiban PKL
 - f. Bentuk-bentuk sangsi dan bentuk-bentuk sangsi bagi PKL yang melanggar
7. Dalam rangka memperbaiki sikap kerja petugas perlu untuk diadakan pelatihan mengenai sikap kerja bagi petugas PKL dalam rangka peningkatan sikap kerja bagi petugas PKL, tahapannya adalah sebagai berikut:
- a. Membuat master plan mengenai pelatihan sikap kerja bagi petugas PKL, meliputi:
 - 1. Waktu dan tempat pelatihan
 - 2. Materi-materi yang diajarkan dalam pelatihan mengenai sikap kerja bagi petugas PKL
 - 3. Metode-metode yang digunakan dalam pelatihan sikap kerja bagi petugas PKL
 - 4. Pihak-pihak yang menjadi tenaga pelatihan sikap kerja bagi petugas PKL
 - 5. Besarnya biaya yang dikeluarkan bagi petugas PKL
 - b. Melakukan sosialisasi tentang adanya pelatihan sikap kerja bagi petugas PKL

Tindakan ini merupakan langkah yang berupa pemberian informasi dan pemahaman tentang perubahan-perubahan yang akan dilakukan baik secara tertulis maupun lisan kepada petugas PKL.

c. Pematangan konsep pelatihan sikap kerja bagi petugas PKL

Langkah ini merupakan tindakan mematangkan konsep pelatihan sikap kerja bagi petugas PKL mengenai materi-materi yang diajarkan, metode yang digunakan, tenaga pelatihan, waktu dan biaya serta pihak yang bertanggungjawab dalam pelatihan dan sekaligus pematangan konsep tentang simulasi sikap kerja tugas kerja petugas PKL dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengaturan dan pembinaan PKL.

d. Pelaksanaan pelatihan dan hasil pelatihan dilapangan bagi petugas PKL

Langkah ini merupakan pelaksanaan pelatihan sikap kerja bagi petugas PKL dalam meningkatkan sikap kerja petugas PKL dalam pengaturan dan pembinaan PKL. Dalam pelaksanaan ini dilakukan pengenalan teori-teori tentang sikap kerja kerja petugas PKL, diskusi tentang materi yang diajarkan dan simulasi tentang pengaturan dan pembinaan PKL.

e. Evaluasi terhadap hasil pelatihan sikap kerja bagi petugas PKL

Langkah ini merupakan evaluasi implementasi untuk membandingkan sikap kerja kerja petugas PKL sebelum diadakan pelatihan bagi petugas PKL sebelumnya dengan sikap kerja kerja petugas PKL setelah dilakukan pelatihan bagi petugas PKL yang dalam pelaksanaanya dibuat semacam standar penilaian mengenai indikator-indikator yang berhubungan dengan sikap kerja, dimana langkah ini terjadi tentunya setelah dalam periode waktu yang ditentukan petugas PKL yang ikut dalam pelatihan sikap kerja melaksanakan tugasnya

melakukan pengaturan dan pembinaan PKL. Apakah ada perubahan yang positif dalam artian lebih efisien dan efektif. Dalam evaluasi terhadap sikap kerja ini tentunya penggalian informasi mengenai sikap kerja petugas PKL kepada PKL perlu untuk digali untuk mengetahui seberapa baik sikap kerja petugas PKL dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengaturan dan pembinaan PKL.

f. Perbaiki secara berkesinambungan kualitas petugas PKL

Langkah ini berupa perbaikan-perbaikan yang dilakukan setelah evaluasi terjadi untuk semakin membuat semakin baiknya sikap kerja petugas PKL dalam melakukan pengaturan dan pembinaan PKL. Hasil perbaikan tersebut selanjutnya dievaluasi lagi secara berkesinambungan dan secara periodik apakah diperlukan tindakan pelatihan lagi atau tidak.

8. Dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja petugas PKL Kota Semarang khususnya petugas PKL Kecamatan Semarang Tengah perlu untuk mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas petugas PKL, beberapa tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Membuat master plan mengenai pelatihan kemampuan kerja bagi petugas PKL, meliputi:

1. Waktu dan tempat pelatihan
2. Materi-materi yang diajarkan dalam pelatihan bagi petugas PKL
3. Metode-metode yang digunakan dalam pelatihan bagi petugas PKL
4. Pihak-pihak yang menjadi tenaga pelatihan bagi petugas PKL
5. Besarnya biaya yang dikeluarkan bagi petugas PKL

- b. Melakukan sosialisasi tentang adanya pelatihan bagi petugas PKL

Tindakan ini merupakan langkah yang berupa pemberian informasi dan pemahaman tentang perubahan-perubahan yang akan dilakukan baik secara tertulis maupun lisan kepada petugas PKL.

- c. Pematangan konsep pelatihan bagi petugas PKL

Langkah ini merupakan tindakan mematangkan konsep pelatihan bagi petugas PKL mengenai materi-materi yang diajarkan, metode yang digunakan, tenaga pelatihan, waktu dan biaya serta pihak yang bertanggungjawab dalam pelatihan dan sekaligus pematangan konsep tentang simulasi tugas kerja petugas PKL.

- d. Pelaksanaan pelatihan dan hasil pelatihan dilapangan bagi petugas PKL

Langkah ini merupakan pelaksanaan pelatihan bagi petugas PKL dalam meningkatkan kapasitas petugas PKL dalam pengaturan dan pembinaan PKL. Dalam pelaksanaan ini dilakukan pengenalan teori-teori tentang kemampuan kerja petugas PKL, diskusi tentang materi yang diajarkan dan simulasi tentang pengaturan dan pembinaan PKL.

- e. Evaluasi terhadap hasil pelatihan bagi petugas PKL

Langkah ini merupakan evaluasi implementasi untuk membandingkan kemampuan kerja petugas PKL sebelum diadakan pelatihan bagi petugas PKL sebelumnya dengan kemampuan kerja petugas PKL setelah dilakukan pelatihan bagi petugas PKL, dimana langkah ini terjadi tentunya setelah dalam periode waktu yang ditentukan petugas PKL yang ikut dalam pelatihan melakukan tugasnya melakukan

pengaturan dan pembinaan PKL. Apakah ada perubahan yang positif dalam artian lebih efisien dan efektif. Dalam proses ini tentunya untuk mengetahui seberapa baik tingkat kemampuan kerja petugas PKL maka informasi-informasi tentang kemampuan kerja petugas PKL harus digali dari PKL-PKL yang tersebar diwilayah Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dengan acuan standar penilaian/ indikator tentang kemampuan kerja bagi petugas PKL.

f. Perbaiki secara berkesinambungan kualitas petugas PKL

Langkah ini berupa perbaikan-perbaikan yang dilakukan setelah evaluasi terjadi untuk semakin membuat efisien dan efektifnya tugas kerja petugas PKL dalam melakukan pengaturan dan pembinaan PKL. Hasil perbaikan tersebut selanjutnya dievaluasi lagi secara berkesinambungan dan secara periodik apakah diperlukan tindakan pelatihan lagi atau tidak.

9. Dalam penelitian yang akan datang bagi peneliti lain, mengingat besarnya Non Koefisien Determinan (KD) sebesar 62, 68 % dari hasil penelitian ini tentang Implementasi Perda No. 11 tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL, maka diharapkan kepada peneliti lain untuk mengambil variabel independen (X) diluar variabel-variabel yang penulis ambil dari teori-teori implementasi George Edwards III, Rina Martini, dkk serta Van Meter dan Van Horn.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bryant, Coraly dan White G. Louise, 1998, *Manajemen Pembangunan*, Diterjemahan oleh Rusyanto L Simatupang, LP3S, Jakarta.
2. Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, MedPres, Jogjakarta.
3. Edward IV C. George, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quartelly Press, Wahingtin D.C., disunting oleh Dra. Hartuti Purnaweni, 1991, Diktat Kuliah Kebijakan Publik, FISIP, Universitas Diponegoro.
4. Gabriel A. Almond, 1983, *Analisis Sosialisasi*, Th. XII No. 1.
5. GBHN, Tap No. IV / MPR / 1999
6. James L. Gibson Dkk, 1990, *Proses dan Struktur Perilaku Organisasi*, Diterjemahan oleh Djakarsih , Erlangga, Jakarta.
7. Davis, Keith dan Newstroom W. John, 1992, *Perilaku Dalam Organisasi*, Diterjemahan oleh Agus Dharma, Erlangga, Jakarta.
8. Masri, Singarimbun dan Effendi, Sofian, 1987, *Metodologi Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
9. Moekijat, 1993, *Teori Komunikasi*, Mandar Maju, Bandung.
10. Moenir A. S, 1987, *Pendekatan Manusia dan Organisasi terhadap Pembinaan Pegawai*, Gunung Agung, Jakarta.
11. Steers, M, Richard, 1985, *Efektivitas Organisasi*, Diterjemahkan oleh Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
12. Wahab, Solichin, Abdul, 1990, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
13. Susanto P. Astrid S Phil, 1983, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial I*, Binacipta, Jakarta.
14. Sumidjo, Wahyu, 1989, *Kepemimpinan dan Motivasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
15. Yuwono S, 1985, *Ikhtisar Komunikasi Administrasi*, Liberty, Yogyakarta.

16. Clapman, Elwood, *Sikap Kekayaan Anda Yang Paling Berharga*, Diterjemahkan oleh Agus Maulan, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1991.
17. Azwar, Saifudin, 1988, *Sikap Manusia, Teori dan Pemikirannya*, Liberty, Yogyakarta.
18. Lestari, Ngesti, 2002, *Studi Implementasi Kebijakan PKL Kota Semarang*, Magister Administasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.
19. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2001 Tentang Otonomi Daerah, Sejahtera Mandiri, Jakarta, 1999.
20. Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research* , Andi Offset, Yogyakarta, 1993.